



Swantara

Majalah Triwulan Lemhannas RI No. 43 TAHUN XI/DESEMBER 2022



HASIL KTT G20

Dan Manfaat Bagi Indonesia

Seputar Kita

Audiensi Ancaman Stunting Terhadap Bonus Demografi Indonesia Tahun 2035

Profil Pejabat

Marsekal Muda TNI Andi Heru Wahyudi: Keikhlasan Tersusun dari Kesabaran Menerima Takdir Tuhan dan Mensyukuri Nikmat yang Telah Diberikan

Opini

Kebebasan Pers dalam Perspektif Ketahanan Nasional

Membangun Rumah Tahan Gempa

Komponen bangunan tahan gempa:



Beton
perbandingan
1 semen : 2 pasir : 3
kerikil : 0,5 air



Batu Pondasi
terbuat dari batu kali
atau batu gunung
yang keras



Kayu



Batu Bata

Mortar
perbandingan 1
semen:4 pasir
bersih : air

Struktur Utama: Pengecoran Beton:

1. Pondasi
2. Balok Pengikat
3. Kolom
4. Dinding
5. Balok Keliling
6. Struktur Atap

1. Pastikan cetakan/bekisting benar-benar rapat dan kuat/kokoh
2. Pengecoran kolom dilakukan secara bertahap setiap 1 m
3. Pastikan adukan di dalam cetakan padat dan tidak berongga
4. Pelepasan cetakan/bekisting paling sedikit 3 hari setelah pengecoran

Perhatikan Hal-hal berikut:

1. Mutu bahan bangunan
2. Detail Sambungan
3. Mutu Pengerjaan
4. Kayu anti rayap





Salam Redaksi

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Shalom
Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan*

Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya telah terbit Majalah Swantara Edisi ke-43, Desember 2022.

Majalah Swantara yang diproduksi oleh Biro Humas Settama Lemhannas RI tetap berusaha sebaik mungkin untuk menyajikan berbagai informasi pilihan yang termuat dalam beberapa rubrik. Tim Redaksi berharap sajian informasi bisa memberikan sudut pandang baru yang membuka wawasan ilmu pengetahuan dari para pembaca sekalian.

Dalam Laporan Utama, tim redaksi menyuguhkan informasi terkait hasil dari seluruh rangkaian Presidensi G20 Indonesia. Seperti kita ketahui bersama sepanjang tahun 2022 forum G20 telah melakukan 437 pertemuan di berbagai tingkatan yang menghasilkan 24 dokumen yang memuat sejumlah komunikasi, rekomendasi, dan masukan hasil pembahasan kelompok kerja. Tentu dari seluruh hasil yang didapat bisa dipetakan sesuai kepentingan yang dimiliki oleh Indonesia.

Majalah Swantara Edisi ke-43 juga menyajikan berbagai rangkuman terkait berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh unit kerja di Lemhannas RI dalam rubrik Seputar Kita. Pada edisi kali ini tim redaksi turut menghadirkan rubrik Profil Pejabat dan Pegawai yang berisikan personil-personil terbaik Lemhannas RI. Tim redaksi juga mempersembahkan berbagai rubrik seperti Hot News, Ragam, serta Opini yang dapat menjadi pilihan sebagai referensi dan sekaligus menambah khazanah pengetahuan bagi pembaca setia Majalah Swantara.

Tim redaksi menyadari bahwa Majalah Swantara masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, redaksi mengharapkan timbal balik berupa kritik dan masukan dari para pembaca, demi eksistensi serta kemajuan karya jurnalistik yang disajikan pada edisi-edisi berikutnya. Tim redaksi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berperan dalam membantu terbitnya Majalah Swantara Edisi ke-43. Semoga, Majalah Swantara bisa memberikan banyak manfaat serta berkesan di hati para pembaca. Homines, dum docent discunt!

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Om Shanti Shanti Shanti Om
Namu Buddhaya*

PELINDUNG ANDI WIDJAJANTO
PEMBINA MOHAMAD SABRAR FADHILAH
PENGARAH PURWADI ARIANTO
PENANGGUNGJAWAB/PEMIMPIN REDAKSI
SURATNO

REDAKTUR ALTON ENDARWANTO H.S.
PENYUNTING/EDITOR BAMBANG IMAN ARYANTO,
CAHYAQADRI HILDAMONA

DESAIN GRAFIS ARINI MAULIDIA

FOTOGRAFER ANGGA MITRA TAMA

SEKRETARIAT MAGISTA DIAN FITRILIA, GATOT, AIDHA
SAHLA ADIWIJAYA, DWI ARIYANI, DEANNISA SAVITRI

PENULIS ARTIKEL MAULIDA ARBANINGSIH,
NAOMI AUGUSTINA

ALAMAT REDAKSI BIRO HUMAS LEMHANNAS RI
JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA 10110

Telp. (021) 3832470

Email: redaksihumaspubbit@gmail.com

Instagram: @lemhannas_ri

Facebook: @lembagaketahanannasionalri

Twitter: @LemhannasRI

Youtube: Lemhannas RI

TikTok: @lemhannas_ri

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

SWANTARA MENERIMA ARTIKEL DAN OPINI DARI LUAR
LEMHANNAS RI DAN AKAN DIMUAT APABILA SESUAI
DENGAN KEBIJAKAN REDAKSI!

Majalah ini dapat diunduh di:



Daftar Isi



6 LAPORAN UTAMA Hasil KTT G20 dan Manfaat Bagi Indonesia

SEPUTAR KITA

- 10 Audiensi Ancaman Stunting Terhadap Bonus Demografi Indonesia 2035
- 12 Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI: Walau dalam Keadaan Kritis, Tapi Kita Tetap Berpikir Tenang
- 13 Ketua KPK Bahas Peran Penting Ibu dan Keluarga dalam Pemberantasan Korupsi
- 14 Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang JDIHN di Lingkungan Lemhannas RI
- 15 Gubernur Lemhannas RI Bahas Geo X
- 16 Pembulatan Gubernur dan Wakil Gubernur Lemhannas RI Pada Peserta PPRA 64
- 18 Pengukuhan Alumni PPRA 64
- 20 Gubernur Lemhannas RI Bahas Demokrasi Di Era Digital Pada Pelatihan Digital Leadership Academy Kementerian Kominfo
- 21 Wakil Gubernur Lemhannas RI: Nasionalisme Tidak Hanya Dibangkitkan dengan Slogan, Harus Dipahami dengan Sejarahnya dan Kebangsaannya
- 22 Gubernur Lemhannas RI: Butuh Kolaborasi Global Untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat, Baik dari Resesi Ekonomi, Maupun Pandemi Covid-19
- 24 Sekretaris Kabinet Beri Ceramah Pada Peserta Pemanjapan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhannas RI
- 25 Presiden Ke-5 RI Apresiasi Langkah Joko Widodo Mengembalikan Fungsi Lemhannas RI
- 26 Refleksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan: Wakil Gubernur Berikan Empat Pesan Kepada Seluruh Peserta
- 28 Gubernur Lemhannas RI Berbicara Lima Kajian Lemhannas RI
- 30 Menjadi Keynote Speaker, Gubernur Lemhannas RI Bahas Strategic Surprises
- 32 Lembaga Pendidikan Akan Menjadi Penjurur Indonesia
- 34 Lemhannas RI dan SMRC Melaksanakan Survei Ketahanan Nasional
- 35 Gubernur Lemhannas RI: Indonesia Bisa Melompat Menjadi Negara Ekonomi Maju dengan Memanfaatkan Bonus Demografi

OPINI

- 36 Kebebasan Pers Dalam Perspektif Ketahanan Nasional
- 38 Revitalisasi Peran Lemhannas RI Menuju World Class Institution
- 40 Refleksi Kesadaran Geografi Kita

PROFIL PEJABAT

42 Marsekal Muda TNI Andi Heru Wahyudi: Keikhlasan Tersusun dari Kesabaran Menerima Takdir Tuhan dan Mensyukuri Nikmat yang Telah Diberikan



PROFIL PEGAWAI

- 46 Maulida Arbaningsih: Menyeimbangkan Karir dan Membesarkan Anak

HOT NEWS

- 48 Presiden Jokowi: Indonesia Berada di Puncak Kepemimpinan Global

49 Komisi III DPR RI dan Pemerintah Sahkan RUU KUHP Menjadi UU



RAGAM

- 50 Spesies Pohon Raksasa Baru Ditemukan Di Sumatra

51 Indahnya Pulau Gosong di Kepulauan Seribu, Muncul di Saat Air Laut Surut



52 GALLERY

Mengapa Orang Sibuk Lebih Bahagia?

1 Lebih Terkontrol

Dengan memiliki banyak kegiatan yang menyibukkan, kamu akan melakukan apapun untuk menguasai situasi demi mengurangi tingkat stres

2 Lebih termotivasi

Ketika karyawan dihadapkan pada tujuan jangka pendek yang tidak terikat oleh waktu, mereka akan sangat termotivasi.

3 Memberi Tujuan

Ketika kamu menyadari bahwa kamu memiliki tujuan, kamu akan bergerak ke arah itu. Menjadi aktif dan terlibat adalah kebahagiaan.

4 Membantu meningkatkan diri sendiri

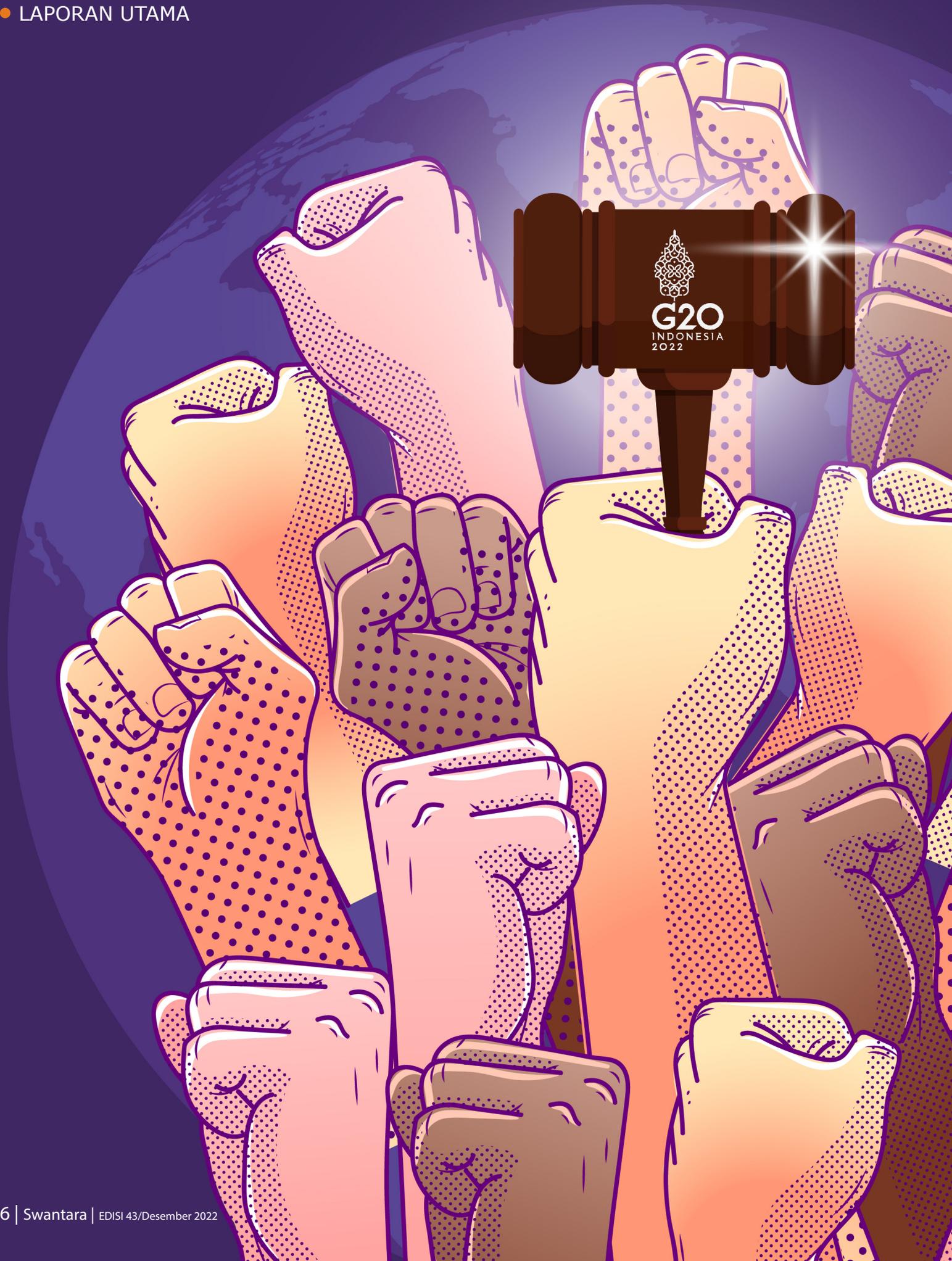
Kamu akan menjadi lebih baik dengan melakukan tugas terus menerus, memperbarui diri sendiri atau mempelajari hal-hal baru.

5 Tidak Sempat untuk Berpikir Negatif

Ruang kosong menarik negativitas. Saat kamu sibuk, kamu tidak sempat memikirkan semua hal negatif.



Sumber: topcareer.id





HASIL KTT G20 DAN MANFAAT BAGI INDONESIA

Presidensi Indonesia pada forum G20 sepanjang tahun 2022, secara keseluruhan telah melakukan 437 pertemuan di berbagai tingkatan yang menghasilkan 24 dokumen yang memuat sejumlah komunike, rekomendasi, dan masukan hasil pembahasan kelompok kerja.

Rangkaian pertemuan G20 yang dilakukan sebelum pertemuan pamungkasnya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15-16 November lalu, juga telah menghasilkan sejumlah hasil nyata, baik dalam Kerangka kerja sama berbagai negara maupun kerja sama bisnis.

KTT G20 yang berlangsung selama dua hari di Nusa Dua, Bali menghadirkan para pemimpin negara G20, sejumlah lembaga internasional, dan beberapa negara yang diundang khusus dalam KTT G20 tersebut. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu global yang krusial.

Indonesia sendiri berharap hasil pertemuan KTT G20 menjadi langkah nyata dari seluruh

negara anggota G20 untuk berfokus pada upaya pemulihan ekonomi dunia. Menjadi tantangan bagi Indonesia yang sepanjang tahun 2022 memegang presidensi G20 harus mampu menjembatani berbagai perbedaan antara negara-negara anggota G20.

Saat penutupan pun, Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan bahwa perlu memperlihatkan kepada dunia bahwa para pemimpin negara anggota G20 mampu menunjukkan sikap bijak, bertanggung jawab, dan menunjukkan jiwa kepemimpinan. “Mari kita bekerja, dan mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover together, recover stronger,” ajaknya.

Presiden juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang hadir yang telah memberikan fleksibilitasnya sehingga deklarasi dapat disepakati dan disahkan. Selain itu, presiden juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh working groups dan



Foto. Direktorat Jenderal Imigrasi

pemikiran, dan kontribusinya bagi Presidensi G20 Indonesia.

Selain deklarasi, Presidensi Indonesia juga menghasilkan concrete deliverables yang berisi daftar proyek kerja sama negara anggota G20 dan undangan. Proyek kerja sama tersebut dapat membantu membuktikan kerja nyata G20 untuk lebih dekat dengan rakyat.

Bali Leaders Declaration dan Kesepakatan G20

KTT G20 yang berlangsung selama dua hari sejak 15 November 2022, berhasil menghasilkan Bali Leaders Declaration. "Alhamdulillah hari ini kita dapat mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration. Ini adalah deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022," kata Presiden Joko Widodo.

Para pemimpin negara anggota G20 menyepakati mengenai perlunya penegakan hukum internasional dan sistem multilateral, penanganan krisis ekonomi termasuk melalui kerja sama kebijakan makro internasional, pengupayaan ketahanan pangan dan energi, serta pengadopsian teknologi digital untuk mendorong inovasi.

Selain itu, dalam KTT G20 menyerukan komitmen bersama untuk mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable

Development Goals/SDGs), mengatasi perubahan iklim, dan memperkuat sektor kesehatan. Para pemimpin negara anggota G20 menyambut baik upaya Indonesia dalam menyusun berbagai isu prioritas dan kerja sama internasional yang terkoordinasi dari negara anggota, negara undangan, serta organisasi regional dan internasional.

Bali Leaders Declaration tersebut memuat 52 poin pernyataan yang juga melampirkan berbagai komunikasi dan dokumen hasil pembahasan seluruh engagement groups G20. Beberapa isu yang masuk dalam Bali Leaders Declaration diantaranya menyinggung ketegangan geopolitik global, krisis pangan, perubahan iklim, Kesehatan global dan transformasi digital. Beberapa poin penting diantaranya, sebagai berikut.

Sikap yang mengutuk perang di Ukraina. "Sebagian besar anggota sangat mengutuk perang di Ukraina dan menekankan hal itu menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa dan memperburuk keadaan yang ada kerentanan dalam ekonomi global."

Menolak penggunaan senjata nuklir. "Penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir tidak dapat diterima. Penyelesaian konflik secara damai, upaya penanganan krisis, serta diplomasi dan dialog, sangat penting. Zaman sekarang tidak boleh perang."

Isu krisis pangan. "Kami mendukung upaya internasional untuk menjaga agar rantai pasokan makanan tetap berfungsi di bawah tantangan keadaan. Kami berkomitmen untuk mengatasi kerawanan pangan dengan memastikan aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan pangan dan produk pangan bagi mereka yang membutuhkan, khususnya di negara berkembang dan negara kurang berkembang."

Selain Bali Leaders Declaration, juga terdapat beberapa kesepakatan dalam bidang ekonomi dan investasi. Diantaranya adalah dana pandemic (pandemic fund) yang dibentuk oleh Menteri keuangan dan Menteri Kesehatan negara-negara anggota G20 sebagai upaya memperkuat arsitektur Kesehatan global melalui mekanisme pembiayaan yang kuat sehingga dunia dapat mencegah dan menanggulangi pandemi di masa datang dengan lebih baik.

Berikutnya adalah dibentuknya Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform di Indonesia untuk mengakselerasi dan percepatan dalam penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang merata dan berkelanjutan. Kesepakatan ini didukung dari Climate Investment Funds dan dukungan kerja sama lembaga internasional lainnya.

Negara-negara anggota G20 juga bersepakat untuk membantu pembiayaan bagi

negara-negara rentan dan miskin melalui pembentukan Resilience and Sustainability Trust (RST) oleh International Monetary Fund (IMF). G20 juga berupaya mengatasi krisis utang negara miskin dan berkembang dengan program restrukturisasi utang melalui kerangka umum pengelolaan utang (Common Framework for Debt Treatment).

Tidak hanya itu, negara-negara G20 pun menyepakati untuk meluncurkan Bali Kompendium. Kesepakatan ini disusun dengan kerja sama United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Kompendium ini nantinya digunakan sebagai panduan berinvestasi oleh negara-negara anggota G20.

Yang menjadi kesepakatan lainnya adalah ketika Indonesia meluncurkan Global Blended Finance (GBF) Alliance atau Aliansi Keuangan Campuran Global disela pelaksanaan rangkaian KTT G20. Tujuan GBF yang akan berpusat di Bali adalah untuk membangun kapasitas pembiayaan campuran yang lebih baik di seluruh wilayah, baik antar negara, sektor swasta, dan filantropi.

Manfaat bagi Indonesia

Selain kesepakatan-kesepakatan yang memiliki manfaat global, terdapat juga sejumlah kesepakatan yang manfaatnya lebih khusus bagi Indonesia dalam bidang ekonomi dan investasi. Salah satunya adalah kesepakatan dengan empat bank sentral negara-negara ASEAN yakni Bank Negara Malaysia (BNM), Banko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT). Bersama Bank Indonesia, keempat bank sentral tersebut sepakat mendorong kemudahan transaksi digital di kawasan.

Kerja sama yang tertuang dalam penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Konektivitas Pembayaran Kawasan ini bakal mendukung dan memfasilitasi perdagangan, investasi, pendalaman pasar keuangan, remitansi, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lintas batas lainnya, serta mendorong ekosistem ekonomi dan keuangan kawasan yang lebih inklusif.

Sementara itu, ada lima negara yang berniat melakukan investasi di Indonesia yaitu Amerika Serikat, China, Inggris, Jepang,

dan Turki. Investasi yang dilakukan Amerika Serikat berbentuk kesepakatan antara Exxon Mobil dengan Pertamina. Kerja sama akan menilai lebih lanjut pengembangan pusat penangkapan dan penyerapan karbon regional di Indonesia. Diperkirakan kerja sama tersebut akan mencapai senilai US\$2,5 miliar atau setara Rp38,82 triliun (asumsi kurs Rp15.529 per dolar AS).

Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga sepakat untuk meluncurkan program Millennium Challenge Corporation (MCC) senilai US\$698 juta untuk membantu mendukung pengembangan infrastruktur transportasi sadar iklim di lima provinsi RI serta tujuan pengembangan lainnya. Rincian dana dalam kerja sama program MCC tersebut adalah US\$649 juta disumbang oleh AS dan US\$49 juta sisanya dikucurkan oleh Pemerintah Indonesia.

Sedangkan China juga telah menyepakati kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Investasi RI dengan CNGR Advanced Material Co Ltd. yang merupakan produsen ternary precursor asal China. Kerja sama yang memiliki nilai investasi US\$5 miliar ini dilakukan untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Jepang dan Inggris pun juga sama-sama menyepakati untuk bekerjasama dengan Indonesia dalam proyek pengembangan angkutan massal perkotaan MRT Jakarta. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang dan Pemerintah Inggris.

Meski banyak negara yang berkeinginan melakukan investasi pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia khususnya MRT. Sebelumnya, Jepang dan Inggris telah menjadi mitra strategis Indonesia dalam melakukan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang, termasuk sektor transportasi.

Sama dengan Jepang dan Inggris, Turki pun melakukan kerja sama dengan Indonesia di sektor transportasi. Kesepakatan bilateral yang dicapai kedua negara adalah produksi bus listrik di dalam negeri dan pembangunan jalan tol Trans Sumatra. Untuk bus listrik,

kerja sama dilakukan oleh pabrikan bus listrik Karsan dari Turki dengan PT. Schahmindo Perkasa (Credo Group). Sedangkan, proyek jalan tol Trans Sumatra dilakukan antara PT Hutama Karya dengan kontraktor Turki, ERG Insaat.

Terdapat sejumlah manfaat bagi Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 tahun ini. Secara strategis, manfaat yang diperoleh yakni forum G20 dapat menjadi salah satu upaya Indonesia dalam mengorkestrasi kebijakan global diantaranya pada isu kesehatan global, stabilitas keuangan, dan perubahan iklim.

Sedangkan manfaat langsung yang dirasakan Indonesia adalah meningkatkan devisa dari kunjungan delegasi ke Indonesia, menghidupkan sektor hospitality, peningkatan konsumsi domestik, pengoptimalan peran UMKM, dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Hal ini dapat terlihat pada sepanjang pelaksanaan presidensi Indonesia 2022 di Bali yang diperkirakan dapat memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar US\$ 533 juta atau sekitar Rp7,4 triliun dan peningkatan konsumsi domestik yang mencapai Rp1,7 triliun.

Sementara di sektor pariwisata sendiri juga diyakini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap angka wisatawan mancanegara sekitar 1,8 juta – 3,6 juta dan juga 600 ribu – 700 ribu lapangan kerja baru. Selain itu, gelaran G20 juga melibatkan UMKM dan menyerap tenaga kerja sekitar 33.000 orang.

Dari sekian banyak manfaat yang diperoleh Indonesia, sektor ekonomi dan investasi menjadi yang paling terdampak positif. Tentunya hal ini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini juga dapat menjadi indikator pengungkit untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia. Dengan meningkatnya ketahanan ekonomi, tentunya diharapkan dapat berdampak pada ketahanan nasionalnya yang semakin tangguh.

Sumber: kemlu.go.id, kemenku.go.id, cnnIndonesia.com, Indonesiabaik.id, dan detik.com

Audiensi Ancaman Stunting terhadap Bonus Demografi Indonesia 2035

Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. membuka audiensi “Ancaman Stunting terhadap Bonus Demografi Indonesia 2035” pada Kamis (6/10) di Ruang Gatot Kaca, Gedung Astagatra Lantai 3, Lemhannas RI.

Dalam sambutannya, Reni Mayerni menjelaskan bahwa Stunting merupakan masalah kesehatan yang dapat meningkatkan risiko kesakitan, kematian, dan hambatan pada pertumbuhan mental maupun motorik. Lanjutnya, stunting bisa diakibatkan oleh faktor multidimensi serta tidak hanya diakibatkan oleh gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil ataupun anak balita. Oleh karenanya dibutuhkan ketersediaan pangan yang cukup.

Melalui audiensi tersebut, Reni Mayerni berharap mendapat masukan terhadap ketersediaan pangan lokal dalam memberikan kontribusi guna penurunan stunting. Hal itu dapat dijadikan sebagai masukan terhadap model intervensi spesifik dan sensitif yang ideal dengan berbagai rencana program atau kegiatan yang di dalamnya melibatkan berbagai kelompok mewujudkan generasi emas 2035 yang memiliki kecerdasan komprehensif, damai dalam interaksi sosial dan berkarakter kuat, sehat menyehatkan dalam berinteraksi

dengan alam serta berperadaban yang unggul.

Hadir sebagai narasumber dalam audiensi tersebut, yaitu Direktur Advokasi dan Kerjasama Lembaga BKKBN RI Wahidah Paheng, M.Si, Team Leader Local Government For Acceleration Stunting Reduction (LGCB-ASR) Mirwan Rahmat Yusuf, S.K.M., dan Ketua Bidang Kerja Sama Dalam Negeri dan Advokasi Perhimpunan Agronomi Indonesia Adhie Widihartho.

Direktur Advokasi dan Kerjasama Lembaga BKKBN RI Wahidah Paheng, M.Si sebagai pemapar pertama membahas program percepatan penurunan stunting. Menurutnya, faktor yang mempengaruhi kejadian stunting terbagi kedalam tiga faktor, yakni tidak langsung, intermediate dan dekat serta langsung. Pada faktor tidak langsung penyebabnya ada pada sanitasi, pendidikan, sosial ekonomi, dan kemiskinan. Lalu pada faktor intermediate dan dekat penyebabnya adalah jarak anak, jumlah anak, umur ibu dan saat hamil. Sedangkan pada faktor langsung penyebabnya ada pada nutrisi, air susu ibu (ASI), dan penyakit.

“Yang paling penting yang harus dilakukan adalah pre-konsepsi yaitu dimana sebelum masuk di 1000 hari pertama kehidupan (HPK) itu kita harus mencegah,” tutur Wahidah Paheng. Sejalan dengan hal tersebut, maka dibuatlah pendekatan intervensi gizi terpadu dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Wahidah Paheng juga menjelaskan mengenai pendekatan keluarga berisiko stunting dalam RAN PASTI yang dapat dimulai dari calon pengantin dengan memenuhi syarat seperti usia lebih dari sembilan belas tahun dan lingkaran lengan lebih dari 23 sentimeter, kemudian pemenuhan gizi pada ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0 sampai 23 bulan dan anak usia 24 sampai 59 bulan.

Program lain yang BKKBN terapkan untuk mempercepat penurunan stunting lainnya adalah Kampung Keluarga Berkualitas untuk menyelenggarakan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga, lalu Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) yang merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dalam bentuk pemberian makanan bergizi seimbang bagi keluarga risiko stunting dengan optimalisasi bahan pangan lokal, dan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) yang merupakan gerakan gotong royong seluruh elemen bangsa dalam mempercepat penurunan stunting yang menasar langsung kepada keluarga berisiko stunting.

Sementara pemapar berikutnya, Ketua Bidang Kerja Sama Dalam Negeri dan Advokasi Perhimpunan Agronomi Indonesia Adhie Widihartho membahas tentang beras fortifikasi dalam gebrak stunting dan sumber daya manusia (SDM) unggul Indonesia. Beras fortifikasi dapat menjadi solusi efektif terhadap penanganan stunting karena harga dapat dibuat terjangkau sesuai daya beli

masyarakat, memungkinkan adanya kepastian supply chain nasional dalam ketersediaan dan kemudahan akses, tidak merubah budaya konsumsi masyarakat dan sesuai standar dan regulasi di Indonesia.

Kemudian, Team Leader Local Government for Acceleration Stunting Reduction (LGCB-ASR) Mirwan Rahmat Yusuf, S.K.M. sebagai narasumber terakhir memaparkan tentang strategi konvergensi Pemerintah Pusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam percepatan penurunan stunting. Konvergensi menjadi penting karena sebagai upaya untuk memastikan seluruh intervensi penurunan stunting sampai pada target sasaran.

Fortifikasi beras adalah salah satu upaya peningkatan konsumsi zat besi dan asam folat pada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Dalam jangka panjang fortifikasi diharapkan mampu mengurangi permasalahan defisiensi mikronutrien, meningkatkan aktivitas fisik, dan kemampuan kognitif masyarakat.

Beras Fortifikasi



Besi/Fe (80 ppe) _____
Seng/Zn (30 ppm) _____
Vit B1 (6,4 ppm) _____
Vit B3 (53 ppm) _____
Asam Folat (1,3 ppm) _____
Vit B12 (0,01 ppm) _____

sumber: kesmas.kemkes.go.id

Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI:

Walau dalam Keadaan Kritis, Tapi Kita Tetap Berpikir Tenang

“Bung Karno memandang perlu adanya pendidikan yang menyiapkan para kader pimpinan atau calon-calon pimpinan bangsa.”

kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Settama Lemhannas RI Brigjen TNI Gathut Setyo Utomo, S.I.P., M.I.P. saat memberikan pengenalan Lembaga kepada peserta penataran Istri/Suami peserta PPRA 64 pada Senin (10/10) di Auditorium Gajah Mada, Gedung Pancagatra Lantai 3, Lemhannas RI.

Pada kesempatan tersebut, Gathut Setyo Utomo menjelaskan bahwa Lemhannas RI dibentuk dan diresmikan oleh Presiden RI Ir. Soekarno pada tanggal 20 Mei 1965. “Bung Karno menghendaki adanya sekolah untuk memahami tentang wawasan kebangsaan, tentang geopolitik.

Jadi pemimpin harus paham tentang geopolitik,” tuturnya. Terkait warna dasar Lemhannas RI, yakni lembayung, dijelaskan bahwa warna tersebut memiliki arti ketenangan dalam bertindak. “Walau dalam keadaan kritis, tapi kita tetap berpikir tenang. Itulah pemimpin,” sambungnya.

Melanjutkan paparannya, Gathut Setyo Utomo juga menjelaskan komponen dari Astagatra. Astagatra terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Trigatra merupakan segala sesuatu yang ada di negara Indonesia yang sifatnya statis, seperti geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam. Sedangkan Pancagatra merupakan segala sesuatu yang ada di negara Indonesia yang sifatnya dinamis, seperti ideologi, politik ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional.

Selain itu, Gathut Setyo Utomo turut menjelaskan tugas dari ketiga kedeputan. Pertama adalah Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI yang bertugas menyelenggarakan tiga jenis pendidikan. Tiga jenis pendidikan tersebut yakni, Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA), Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA), dan Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA). Kedua adalah Deputi Bidang Pengkajian Strategik yang bertugas menyiapkan kajian strategis jangka panjang, kajian strategis jangka menengah, kajian strategis jangka pendek, dan kajian strategis terkini (quick responses). Dan yang ketiga, adalah Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang bertugas melaksanakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, pelatihan untuk pelatih, dialog kebangsaan, dan evaluasi dampak.



PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN 64

Ketua KPK Bahas Peran Penting Ibu dan Keluarga dalam Pemberantasan Korupsi

“Keluarga hebat itu karena ada andil istri dan ibu dari anak-anak. Tidak ada satupun yang bisa meraih sukses tanpa peran dari pada istri itu sendiri,” kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK) Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Firlu Bahuri, M.Si saat mengisi ceramah pada penataran istri/suami peserta PPRA 64 Lemhannas RI pada Selasa (11/10) di Ruang NKRI, Gedung Pancagatra Lantai 3, Lemhannas RI.

Dalam ceramah yang membahas tentang “Peran Penting Ibu dan Keluarga dalam Pemberantasan Korupsi”, Firlu Bahuri menyampaikan lima strategi yang harus diilhami oleh seorang istri/suami, yakni memahami posisi dari jabatan istri/suami, visi, misi dan program keluarga, tujuan keluarga, memahami tantangan nasional dan cara untuk fokus pada tantangan tersebut. Ia juga berpesan kepada para istri/suami agar menjaga keluarga dari berbagai permasalahan bangsa seperti bencana alam dan non alam, narkoba, terorisme dan radikalisme serta korupsi. “Kalau setiap perempuan hebat, maka tentulah budaya peradaban suatu bangsa akan hebat,” tuturnya.

Selanjutnya, Firlu Bahuri juga menyampaikan beberapa hal mengenai tindak pidana korupsi. Menurutnya, tindak pidana korupsi adalah kejahatan serius, negara gagal dalam mewujudkan tujuan negara akibat korupsi. Selain itu, Firlu Bahuri juga menjelaskan bahwa KPK melakukan kajian, merumuskannya sesuai tugas pokok KPK, sekaligus memberikan rekomendasi terhadap sistem-sistem yang berlaku. Terkait pemberantasan korupsi, KPK memiliki tiga strategi yang melibatkan peran serta masyarakat untuk menciptakan budaya anti korupsi. Tiga strategi tersebut, yaitu melakukan pendekatan pendidikan publik, pencegahan sistem dan penegakkan hukum yang profesional dan akuntabel.

Beberapa program unggulan dari KPK untuk memberantas korupsi turut disampaikan oleh Firlu Bahuri, mulai dari paku integritas, desa anti korupsi, politik cerdas berintegritas dan jelajah negeri bangun antikorupsi. Selanjutnya, ia juga menyampaikan pedoman slogan nilai anti korupsi yaitu “Jumat Bersepeda KK” yang artinya jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.

Di akhir paparan, Firlu Bahuri menyampaikan kepada para peserta penataran istri/suami untuk selalu peduli kepada pasangan, selalu menanamkan kepercayaan kepada pasangan dan jangan pernah berhenti untuk memiliki mimpi.



Sosialisasi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang JDIHN di Lingkungan Lemhannas RI

Sosialisasi “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN di Lingkungan Lemhannas RI”, diselenggarakan pada Selasa (11/10) di Ruang Pancasila, Gedung Trigatra Lantai 3, Lemhannas RI. Sosialisasi tersebut menghadirkan Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Nofli, Bc.IP., S.Sos., S.H., M.Si. sebagai narasumber.

Pada kesempatan tersebut, Nofli menyampaikan tujuh hal yang dipresentasikan yaitu pembentukan basis data dokumen hukum dalam rangka kebijakan penataan regulasi, JDIHN, teknologi informasi komunikasi dan pengelolaan dokumentasi/informasi, sistem pemerintahan berbasis elektronik, kinerja pengelolaan JDIHN, ragam inovasi anggota JDIHN, dan penghargaan JDIHN awards.

Nofli juga menjelaskan sejarah pemikiran pembentukan JDIHN yang diawali pada tahun 1974 tentang seminar hukum nasional III, dalam rangka pembangunan bidang hukum yang mutlak diperlukan sebagai pembentukan

dokumentasi dan perpustakaan hukum yang baik. Kemudian pada tahun 1999, terbit Keppres 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi Hukum Nasional untuk memacu dan mengembangkan JDIHN di masa mendatang.

Kini, dalam Perpres 33 Tahun 2012 tentang JDIHN, arah kebijakannya tidak lagi hanya sebagai dokumentasi saja melainkan sebagai bentuk pengelolaan informasi hukum untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab. “Sebagai pemahaman pada Perpres 33 ini, pengelolaan informasi hukum untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kepada pemerintah yang baik, bersih, dan bertanggung jawab,” kata Nofli.

JDIHN memiliki peran dalam rangka penataan regulasi, yaitu membangun jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, lalu menjamin ketersediaan dokumentasi

dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, dapat diakses secara cepat dan mudah dalam sebuah basis data nasional dokumen hukum nasional, serta dapat meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata-pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

JDIHN sendiri merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Sedangkan dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Nofli juga menyampaikan manfaat pengelolaan JDIHN. Manfaat tersebut, yakni sebagai pengelolaan dokumen hukum berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi, peningkatan pelayanan publik terkait dokumentasi dan informasi hukum, website JDIH dan JDIHN sebagai sumber dokumen hukum yang terpercaya, untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan mendukung tercapainya satu data Indonesia.

Terkait dengan kebijakan strategis JDIHN, Nofli menyampaikan strateginya terdiri dari komitmen pimpinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur TIK, pengembangan sistem/aplikasi berbasis TIK, pengembangan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum, penguatan jaringan anggota JDIHN serta sosialisasi dan promosi JDIH dan JDIHN.

Mengakhiri paparan, Nofli menyampaikan hal yang menjadi fokus JDIHN di tahun 2022 adalah koleksi data dokumen hukum, kelengkapan metadata, validitas data, keamanan data dan JDIHN sebagai aplikasi umum SPBE.



Gubernur Lemhannas RI Bahas GEO X

Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto menghadiri pembukaan International Conference on Business, International Relations, and Diplomacy (ICOBIRD) 2022 dan Commemoration of 10 Years Binus University International Relations Study Program pada Kamis (13/10) di Auditorium Kampus Anggrek Binus University, Jakarta Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Andi Widjajanto memberikan paparan tentang Geo X. "Geo untuk geopolitik, X adalah faktor yang tidak diketahui," ucapnya. Ia juga menyampaikan bahwa saat ini Lemhannas RI tengah mempelajari tentang Geo V yang karakteristik utamanya adalah konektivitas dan rantai pasok global. Menurut Andi Widjajanto, karakteristik yang sama juga bisa ditemukan jika melihat lebih dekat pada revolusi geomaritim.

"Di geomaritim, kita bisa melihat kalau kita sekarang berada di era keempat dari geomaritim," tutur Andi Widjajanto. Sumber kekuatan geomaritim era keempat adalah teknologi siber dan teknologi maritim. Kombinasi dari teknologi-teknologi ini akan menciptakan infrastruktur yang lebih kuat. "Sekali lagi, karakteristik utamanya adalah konektivitas global. Dan sekarang kita melihat banyak sekali inisiasi global untuk menciptakan sebuah infrastruktur global," katanya.

Andi Widjajanto juga menyampaikan lima identifikasi dari inisiasi global, yakni Belt and Road Initiative, Indo-Pacific

Economic Framework for Prosperity, Global Development Initiative and Global Security Initiative, Globalization Free Trade dan North South Corridor. Ia juga menjelaskan resiko konektivitas yang meningkat sebagai akibat pandemi Covid-19 global. Resiko konektivitas pada arena maritim berkaitan dengan choke point. Choke point di tengah-tengah dunia berada di Indonesia, yaitu di Selat Malaka, Selat Sunda, Natuna Utara, Selat Sulawesi dan Selat Lombok. "Kita memiliki beberapa choke point di Indonesia. Jika terdapat gangguan pada choke point ini, maka kebebasan navigasi untuk mengamankan distribusi pangan dan energi ke seluruh dunia akan terganggu. Itu adalah tantangan besar kita saat ini," ungkapnya.

Lebih lanjut, Andi Widjajanto menyebut bahwa salah satu masalah besar yang perlu ditangani pada lima tahun ke depan bagi industri otomotif Indonesia yang mencoba untuk menjadi ekosistem utama untuk EV (electric vehicle) adalah cara untuk mengamankan pasokan semikonduktor. Hal tersebut adalah masalah pada pembangunan Indonesia untuk bergerak dari ekonomi 2.0 menuju ekonomi 4.0. "Tapi sekarang kita menghadapi pertanyaan besar, bagaimana mengamankan pasokan semikonduktor chip untuk lima tahun ke depan," jelasnya.

Terkait dengan faktor X yang mewakili "unknown", Andi Widjajanto menyampaikan untuk mencoba memandangi krisis dengan jarak dekat dan berpikir untuk waktu tiga sampai enam bulan kedepan. "Jika kita bisa

memitigasi kemungkinan krisis yang terjadi pada 6 bulan ke depan, kita bisa berpikir untuk melanjutkan informasi struktural, pembangunan ekonomi, dan perencanaan strategis," katanya.

Andi Widjajanto juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki tantangan mengantisipasi krisis pangan, energi, dan finansial sambil mencoba melihat dengan cermat tantangan pertahanan. "Untuk Indonesia, kuncinya adalah untuk mentransformasi, bagaimana mengadopsi teknologi baru. Dalam hal pertahanan, bidang ilmu kami, kami sudah merencanakan bagaimana mengubah teknologi kita," ungkapnya.

Menutup paparannya, Andi Widjajanto menyampaikan harus adanya penyusunan rencana strategis sampai tahun 2070 jika ingin menikmati stabilitas global, pertumbuhan ekonomi, konektivitas global, lalu Indonesia berhasil melaksanakan konsolidasi demokrasi, kemudian mentransformasi ekonomi dari ekonomi 2.0 ke ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ia juga mengingatkan harus mencoba mengantisipasi eskalasi dan dinamika variabel vertikal atau global khususnya persaingan hegemoni, pertumbuhan ekonomi global dan gangguan rantai pasok global.

"Permintaan terakhir saya adalah untuk BINUS supaya menawarkan usulan untuk membuat kembali konektivitas global, untuk membuat kembali rantai pasok global tanpa memutuskan hubungan dunia," pungkask Andi Widjajanto.

PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN 64

Pembulatan Gubernur dan Wakil Gubernur Lemhannas RI Pada Peserta PPRA 64





Menjelang berakhirnya Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 64, Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto memberikan pembulatan kepada peserta PPRA 64 pada Senin (17/10), di Auditorium Gajah Mada, Gedung Pancagatra, Lemhannas RI.

Salah satu tugas Lemhannas RI adalah membentuk karakter kepemimpinan strategis. Mengawali paparannya, Andi Widjajanto menegaskan hal-hal yang harus dicari dari kepemimpinan strategis tersebut. Secara militer, ia memberikan gambaran dari kepemimpinan Napoleon. “Napoleon itu pemimpin yang jenius, pemimpin yang memang seolah-olah mendapatkan talenta khusus bahkan alami untuk menjadi jenderal,” ungkapnya.

Andi Widjajanto juga menyampaikan bahwa kepemimpinan strategis itu akan berusaha mencari Napoleon-Napoleon baru yang biasanya akan terbentuk dalam lima generasi. Berangkat dari hal tersebut, ia berpesan kepada peserta PPRA 64 agar setelah menjadi pemimpin untuk tidak lupa melakukan kegiatan mentoring. “Junior-juniornya disiapkan sehingga regenerasinya berjalan. Moga-moga dalam proses regenerasi ini muncul Napoleonnya, muncul pemimpin jeniusnya,” jelasnya.

Melanjutkan paparannya, Andi Widjajanto mengatakan bahwa semakin kesini semakin relevan bahwa warna Lemhannas RI itu lembayung yang memiliki arti tenang dalam bertindak. Ia juga menekankan bahwa Lemhannas RI semakin relevan memiliki Astagatra yang artinya bisa mengkaji, meneliti, dan menganalisis banyak variabel.

Menyinggung karakter baru yang harus dimiliki peserta PPRA 64, Andi Widjajanto menyampaikan diantaranya harus dapat menjadi pemimpin digital, pemimpin yang tidak boleh anti teknologi dan takut teknologi. “Jadi generasi digital. Sesederhana betul-betul menjadi generasi yang memanfaatkan teknologi,” tuturnya. Ia berpesan untuk generasi digital agar dapat mengambil orang-orang yang ada pada generasi Y dan Z, yang memang dunianya sudah masuk ke era digital dan teknologi. Sementara terkait dinamika geopolitik terkini, Gubernur Lemhannas RI berpesan kepada peserta PPRA 64 untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan karena dampaknya akan banyak. “Di titik itu lah teman-teman akan berada di posisi-posisi yang makin strategis,” katanya.

Selain itu, Andi Widjajanto menyampaikan beberapa tren yang harus dilihat kedepan. Salah satunya adalah tren negara dengan aktivitas tentara sibernya. Ia berpesan agar apapun tugas yang akan diemban peserta PPRA 64 kelak dapat menyampaikan dan mengkomunikasikan dengan cara yang benar karena dunia sudah menjadi dunia media.

Terkait proses demokrasi, Andi Widjajanto menyampaikan bahwa sejak Pemilu 2014, Indonesia mulai memasuki tahap konsolidasi demokrasi. Idealnya, kematangan demokrasi dapat tercapai setelah melalui tujuh pemilu demokratis. Namun demikian, Indonesia perlu mewaspadaai perkembangan situasi terkini yang sarat akan ketidakpastian. “Semua perencanaan kerja kedepan harus memperhatikan timeline dimana suhu politik Indonesia akan memanas,” harapnya.

PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN 64

Pengukuhan Alumni PPRA 64



U sai penutupan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 64, alumni PPRA 64 mengikuti acara pengukuhan Dewan Pengurus Angkatan (DPA) IKAL Lemhannas (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas) masa bakti tahun 2022-2027 oleh Ketua Umum IKAL-Lemhannas Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar pada Selasa (18/10) di Ruang Dwi Warna Purwa, Gedung Pancagatra, Lemhannas RI.

Dalam kesempatan tersebut, Agum Gumelar mengucapkan selamat datang kepada

para alumni yang telah menjadi anggota IKAL-Lemhannas yang merupakan rumah besar tempat berkumpulnya para alumni dari lembaga yang sangat prestisius. "Sekarang ini bertambahlah sembilan puluh sembilan orang pemikir-pemikir handal di jajaran IKAL," tuturnya.

Agum Gumelar berpesan agar alumni PPRA 64 dapat menjaga nama baik almamater Lemhannas RI. Kemudian, ia juga mengingatkan kembali akan dua jati diri yang harus dimiliki anggota IKAL-Lemhannas, yakni harus peduli terhadap situasi dan kondisi

bangsa dan harus berwawasan negarawan dalam arti apapun yang dilakukan dan diperbuat agar diorientasikan pada kepentingan bangsa dan negara. Dengan dua jati diri tersebut, diharapkan semua anggota IKAL-Lemhannas bisa mengabdikan kepada bangsa dengan sempurna.

Di akhir sambutan, Agum Gumelar mengingatkan kembali kepada alumni PPRA 64 untuk menjaga solidaritas TNI dan POLRI. "Karena solidaritas TNI dan POLRI adalah jaminan kokohnya NKRI," pungkasnya.

Gubernur Lemhannas RI Bahas Demokrasi Di Era Digital pada Pelatihan Digital Leadership Academy Kementerian Kominfo

“Hari ini kita berada dalam era konsolidasi demokrasi. Mestinya diharapkan kita bisa melakukan 7 kali pemilu demokratik berturut-turut,” kata Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto saat menjadi narasumber dalam Digital Leadership Academy (DLA) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Jumat (21/10) secara virtual.

Dalam acara tersebut, Andi Widjajanto menyampaikan apabila Indonesia berhasil melakukan demokrasi keenam dan ketujuh. Setelah era reformasi, Indonesia akan menjadi salah satu negara dari 40 negara yang memiliki

predikat demokrasi matang. Menurutnya, kondisi demokrasi Indonesia cenderung berada di papan tengah global. Lembaga internasional menilai Indonesia unggul pada aspek elektoral melalui pelaksanaan pemilu demokratis rutin. Selain itu, ia menilai masyarakat Indonesia juga dinilai cukup leluasa untuk menyampaikan pendapatnya di platform publik.

Namun demikian, Andi Widjajanto juga memiliki penilaian lain menyangkut relatif lemahnya pada aspek budaya politik di Indonesia. Proses kaderisasi pun, menurutnya belum berjalan optimal. Ia melihat kondisi demokrasi sekarang ini dinilai belum matang sehingga menjadikannya lebih rentan

terhadap dampak negatif dari disrupsi teknologi digital, misalnya praktik manipulasi yang terjadi melalui ruang digital. Disisi lain, menurutnya ada banyak ancaman demokrasi lainnya, mulai dari kembalinya rezim authoritarian, penggunaan politik identitas, merebaknya korupsi, dan praktek diskriminasi.

Lebih lanjut, Andi Widjajanto juga menilai bahwa pada dasarnya Pemerintah sejak tahun 2014 sudah berusaha membangun jejaring infrastruktur digitalnya yang relative massive. “Yang harus kita perkuat berikutnya adalah misalnya tentang dari sisi digital equality disaat kita harus memastikan semua warga negara di setiap wilayah dimanapun itu memiliki akses kepada teknologi jejaring digital yang sama,” tuturnya.

Dilihat dari kapasitas digital nasional, tantangan yang ada mulai dari kelompok kriminal, teroris siber, hacktivism dan peretas pemula menunjukkan betapa kompleksnya ancaman saat ini. “Untuk mengatasi ini satu-satunya cara bagi Indonesia adalah meningkatkan secara signifikan kapasitas digital nasionalnya,” ungkap Andi Widjajanto.

Terkait digitalisasi demokrasi, Andi Widjajanto menjelaskan bahwa digitalisasi demokrasi memiliki banyak tingkatan yang paling masif dari sisi adaptasi teknologi, dan pengembangan infrastruktur adalah e-voting. “e-voting adalah satu sisi yang harus kita siapkan. Mungkin tidak akan sempat untuk pemilu 2024 tapi mungkin untuk pemilu dimana demokrasi kita sudah matang di 2029 hal ini sudah bisa dilakukan,” katanya.

Selanjutnya, Andi Widjajanto juga memaparkan hal-hal yang harus dilakukan untuk menuju kematangan digital. Di Indonesia, menurutnya, penilaian indeks kesantunan digital (digital civility) masih cukup rendah. Terkait hal tersebut, Indonesia memang harus meningkatkan kematangan digital dengan cara mengadopsi teknologi digital dan melakukan penguatan literasi digital untuk memperkuat narasi yang tidak menebarkan ketakutan. Jika tidak berhasil bergerak ke digital, teknologinya akan stagnan yang kemudian narasinya akan lebih cenderung ke arah narasi yang bersifat ketakutan.

Selain itu, hal lain yang muncul adalah mobokrasi demokrasi yang dikendalikan oleh massa yang telah beralih ke digital dan memunculkan hoaks, maka terjadilah demokrasi yang akan dipenuhi misinformasi politik. “Kita harapkan tentunya ada demokrasi yang lebih interaktif ketika demokrasi digital secara kinetik didukung oleh gerakan akar rumput yang kuat dan kita juga bisa mengembangkan demokrasi,” pungkask Andi Widjajanto.



Wakil Gubernur Lemhannas RI: Nasionalisme Tidak Hanya Dibangkitkan dengan Slogan. Harus Dipahami dengan Sejarahnya dan Kebangsaannya

Wakil Gubernur Lemhannas RI Letnan Jenderal TNI Mohamad Sabrar Fadhilah memberikan materi penunjang pada pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) Angkatan II dan Yayasan Perguruan Cikini Tahun 2022 pada Senin (24/10), di Ruang Dwi Warna Purwa, Gedung Pancagatra, Lemhannas RI.

Mengawali paparannya, Mohamad Sabrar Fadhilah menjelaskan bahwa Bung Karno menyampaikan Lemhannas RI adalah sekolah yang lebih menitikberatkan kepada geopolitik. "Kita tahu perubahan yang terjadi, perkembangan zaman, kemajuan teknologi. Ini menyebabkan banyak hal terkait geopolitik dunia yang terus mencari caranya, mencari bentuknya," tuturnya.

Lebih lanjut, Mohamad Sabrar Fadhilah menyampaikan terkait konsep ketahanan nasional yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Trigatra terdiri dari Geografi, Sumber Kekayaan Alam dan Demografi. Trigatra sifatnya statis dan sulit mengalami perubahan. Sedangkan Pancagatra terdiri dari Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam. Pancagatra bersifat lebih dinamis dan mengalami perubahan yang cepat dan signifikan.

Dalam memahami Indonesia, perlu mengetahui sejarah perjalanan bangsa Indonesia, budaya dan peradaban, Kesepakatan bangsa dalam hal ini konsensus dasar dan nilai-nilai kebangsaan, serta memahami perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional. Setelah memahami keempat hal tersebut, kita dapat memahami kondisi Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional.

Kemudian, Mohamad Sabrar Fadhilah juga membahas terkait nasionalisme yang sangat diperlukan dalam mewujudkan kepentingan nasional dan bangsanya. "Nasionalisme tidak hanya dibangkitkan dengan slogan. Harus dipahami dengan sejarahnya, kebangsaannya," katanya. Ia berharap rasa kebangsaan ini menyebabkan semua orang secara kolektif menjadi anak bangsa yang terus menjaga negerinya dengan baik.

Di akhir paparan, Mohamad Sabrar Fadhilah menyampaikan harapannya agar yang dilakukan peserta pemantapan nilai-nilai kebangsaan hari ini dapat memberikan kontribusi terbaik yang positif untuk menatap masa depan negeri yang jauh lebih baik melalui pengabdian para peserta.

Gubernur Lemhannas RI:

Butuh Kolaborasi Global Untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat,

Baik Dari Resesi Ekonomi maupun Pandemi Covid-19



“Adikuasa dunia selanjutnya adalah konektivitas,” kata Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto saat menghadiri pembukaan The 19th Annual Meeting of the Valdai Discussion Club and Presentation of the Valdai Club Report “A World Without Superpowers”, pada Senin (24/10), di Moskwa, Rusia.

Mengawali paparannya pada sesi Presentation of the Valdai Club Report “A World Without

Superpowers”, Andi Widjajanto menyampaikan bahwa saat ini dunia memasuki evolusi Geopolitik V. Era Geopolitik V merupakan era konektivitas global, era rantai pasok global. Pada era ini, sumber konflik lebih berkaitan dengan sumber-sumber strategis seperti kemampuan untuk mengembangkan teknologi baru dan kapasitas untuk membangun jaringan global.

Terkait hal tersebut, saat ini sudah terlihat

beberapa inisiasi global yang mencoba menciptakan konektivitas global. Inisiasi global sudah mulai berkembang sejak abad ke-20 dengan kerangka globalisasi perdagangan bebas. Melalui proyek tersebut, para inisiator mencoba menciptakan sebuah desa global dan sekarang diikuti oleh beberapa inisiasi. Pertama, Belt and Road Initiative dari Tiongkok yang ditantang oleh Indo-Pacific Economic Framework yang diusulkan oleh Amerika Serikat pada November 2021. Selain



Foto. © Valdai Discussion Club

itu ada inisiasi dari Rusia untuk mengamankan rantai pasok pangan dan energi dengan membangun The International North-South Transport Corridor. Inisiasi terbaru saat ini adalah Global Development Initiative dan Global Security Initiative yang diusulkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping pada Agustus 2022.

Namun, konektivitas global ini menimbulkan perselisihan dan pemisahan dunia. Andi Widjajanto memandang hal tersebut sebagai teka-teki yang harus dipecahkan. "Proyek

konektivitas global menimbulkan kekacauan rantai pasok. Fraktur ini bisa dilihat pada persaingan teknologi antara Amerika dan Tiongkok yang meningkat menjadi perang perdagangan. Ketegangan wilayah antara Rusia dan Barat di Krimea, Georgia, dan Ukraina, meningkatnya ketegangan antara Amerika dan Tiongkok atas Taiwan, dan akhirnya kekacauan energi di Eropa," ujarnya.

Fraktur yang terjadi juga dinilai dapat meningkatkan risiko pada domain maritim. Menurut Andi Widjajanto, perlu adanya jaminan kebebasan navigasi. "Kita harus melindungi aliran bebas perdagangan, rantai global pada choke point maritim global," tuturnya. Seperti diketahui, beberapa choke point maritim global berada di lautan Indonesia.

Sumber lain fraktur global saat ini bisa dilihat pada domain teknologi. Inti dari konektivitas global adalah kemajuan teknologi baru, khususnya pengawasan maritim, ruang angkasa, siber, dan kecerdasan buatan. Pada domain geo-tech juga bisa terlihat persaingan yang sengit antara beberapa negara di dunia.

Mencermati fraktur yang terjadi di atas, Andi Widjajanto menyampaikan rekomendasi skenario terbaik. "Skenario terbaik tentunya adalah kolaborasi global," ungkapnya. Pada era rantai pasok global saat ini, proyek infrastruktur global menimbulkan kekacauan rantai pasok. Proyeksi kekuatan dari kekuatan besar juga menunjukkan peningkatan persaingan global yang menyebabkan resesi ekonomi global.

Andi Widjajanto menyadari bahwa Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi. "Indonesia harus bergerak maju untuk menyesuaikan kerangka baru ekonomi hijau dan ekonomi biru digital. Indonesia juga harus menyelesaikan proses politik konsolidasi demokrasi dengan melaksanakan dua pemilihan umum pada tahun 2024 dan 2029," ujarnya. Guna mencapai tujuan tersebut, yang dibutuhkan oleh Indonesia bukan tekanan adikuasa, bukan proyeksi kekuatan dari kekuatan hegemoni, bukan penyebaran kapal selam nuklir di perairan Indonesia.

Namun, yang dibutuhkan adalah kolaborasi global untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, baik dari resesi ekonomi maupun pandemi Covid-19. Oleh karena itu, perlu dirancang solusi jangka pendek untuk memitigasi tiga potensi krisis, yakni krisis energi, krisis pangan, dan krisis finansial. "Kita perlu menginisiasi sebuah proyek global yang menghubungkan semua proyek infrastruktur global yang saat ini memisahkan dunia. Kita perlu menciptakan rantai pasok global yang lebih kuat. Kita perlu menciptakan jaringan global yang lebih kuat. Jadi, adikuasa dunia selanjutnya adalah konektivitas," pungkas Andi Widjajanto.

Sekretaris Kabinet Beri Ceramah Kepada Peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI



Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Dr. Ir. Pramono Anung, M.M. berkesempatan memberikan materi kepada para peserta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) Angkatan II dan Yayasan Perguruan Tinggi Cikini pada Rabu (26/10) di Ruang Pancasila, Gedung Trigatra Lantai 3, Lemhannas RI.

“Kita beruntung ada lembaga seperti Lemhannas yang mencetak orang seperti saudara-saudara sekalian dan berbagai angkatan yang ada, yang diharapkan bisa menjadi agen perubahan untuk tetap menjaga konsensus dasar kebangsaan ini,” kata Pramono Anung saat mengawali paparannya membahas Empat Konsensus Dasar Bangsa yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pemahaman yang utuh disertai pengamalan Empat Konsensus Dasar Bangsa dan wawasan kebangsaan akan memantapkan dan memperkuat identitas nasional yang memainkan peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara geopolitik, Indonesia saat ini sedang berada pada

Kita beruntung ada lembaga seperti Lemhannas yang mencetak orang seperti saudara-saudara sekalian dan berbagai angkatan yang ada, yang diharapkan bisa menjadi agen perubahan untuk tetap menjaga konsensus dasar kebangsaan ini.

**Sekretaris Kabinet Republik Indonesia
Dr. Ir. Pramono Anung, M.M.**

puncak kepemimpinan negara-negara dunia karena Indonesia pada tahun ini memegang presidensi G20, negara-negara dengan ekonomi besar dunia. Pramono Anung juga menyampaikan jika sistem dan peraturan yang ada tetap dipertahankan, harapannya pada puncak emas Indonesia di tahun 2045

ekonominya akan berada di urutan empat sampai lima besar dunia.

Lebih lanjut, Pramono Anung menyampaikan bahwa kita harus betul-betul menjaga identitas. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas yang dimiliki. Identitas nasional dapat dimulai dengan keyakinan bersama tentang legitimasi sistem politik suatu negara hingga nilai-nilai kebangsaan serta budaya.

Selanjutnya, Pramono Anung menjelaskan terkait manfaat identitas nasional dan wawasan kebangsaan. Identitas nasional dan wawasan kebangsaan memberikan manfaat pada empat faktor, yakni keamanan, pembangunan, pemerintahan, dan kesetiakawanan sosial. Manfaat tersebut di antaranya menghindarkan masyarakat dari potensi ketegangan politik, dapat menghasilkan elit ekonomi dan politik yang bekerja keras demi pembangunan negara, pelayanan publik yang efektif, serta anggota masyarakat akan saling mendukung dan membantu anggota masyarakat lain yang membutuhkan.

Berbicara soal isu-isu terkini seperti pandemi Covid-19 dan potensi varian barunya, cuaca ekstrem, tingkat inflasi, risiko perlambatan ekonomi, dan keberlanjutan krisis ekonomi global, akan menjadi persoalan yang sangat serius. Untuk itu, Pramono Anung juga menyampaikan bahwa tantangannya tidak mudah, tetapi peluang untuk Indonesia menjadi bangsa besar juga terbuka.

Menutup ceramahnya, Pramono Anung berpesan agar wawasan kebangsaan dan konsensus dasar bangsa tidak menjadi bahan perdebatan, namun memperkuat kita sebagai bangsa. “Inilah yang mempersatukan kita semua, yang membuat kita semua sampai dengan hari ini, kita menjadi kuat sebagai bangsa,” pungkasnya.



Presiden ke-5 RI Apresiasi Langkah Presiden Joko Widodo Mengembalikan Fungsi Lemhannas RI

Foto. anri.go.id

Presiden Republik Indonesia Periode 2001-2004 Megawati Soekarnoputri mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo yang mengambil langkah untuk mengembalikan fungsi awal Lemhannas RI. Hal tersebut disampaikan Presiden ke-5 RI tersebut dalam acara Bandung-Belgrade-Havana in Global History and Perspective pada Senin (7/11).

Dilansir dari Tempo.co, Megawati Soekarnoputri mengungkapkan bahwa pendirian Lemhannas RI sesungguhnya adalah jawaban bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan geopolitik yang dinamis.

Menyoroti kondisi terkini, Megawati Soekarnoputri juga menyampaikan kekhawatirannya terkait kondisi geopolitik yang

terjadi belakangan ini. Kekhawatiran yang muncul adalah jika negara-negara di dunia akan berlomba-lomba membangun senjata hingga mabuk akan kekuatan. "Seperti perang asimetris, proxy war, perang dagang, perang persenjataan, dan perang hegemoni dengan potensi eskalasi yang begitu cepat dan mengkhawatirkan kita semua," katanya.

Menurut Megawati Soekarnoputri, untuk menjawab dinamika geopolitik dunia, maka Indonesia perlu memperkuat rasa persaudaraan sesama anak bangsa. Oleh karena itu, langkah Presiden Jokowi mengembalikan fungsi seperti diawal pembentukan Lemhannas RI, dirasa tepat dan patut diapresiasi. "Jadi Alhamdulillah Pak Jokowi sudah menginstruksikan untuk supaya sesuai kembali seperti yang apa yang dikehendaki Bung Karno terhadap Lemhannas tersebut," pungkasnya.

Refleksi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

Wakil Gubernur Memberikan Empat Pesan Kepada Seluruh Peserta

Lemhannas RI menyelenggarakan kegiatan “Refleksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Terhadap Proses Belajar Mengajar Tahun 2022” pada Selasa (8/11) di Auditorium Gajah Mada, Gedung Pancagatra, Lemhannas RI.

A cara yang berlangsung selama dua hari tersebut merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka mengevaluasi kegiatan proses belajar mengajar tahun 2022 yang dikaitkan dengan sepuluh komponen pendidikan dan menerima masukan dan saran serta pemikiran yang akan digunakan dalam kesiapan penyelenggaraan program pendidikan pada tahun 2023.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Mohamad Sabrar Fadhillah yang mewakili Gubernur Lemhannas RI memberikan sambutan. “Dari proses belajar mengajar yang sudah kita lalui bersama maka kedepan perlu ada pemikiran baru yang lebih tepat sasaran,” ujarnya. Hal tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan program pendidikan reguler angkatan (PPRA) 63 dan 64 di tahun 2022 yang dilaksanakan secara kombinasi tatap muka dan daring melalui aplikasi zoom.

Lebih lanjut, Mohamad Sabrar Fadhillah juga menyampaikan bahwa kualitas para tenaga ahli pengajar, tenaga ahli pengkaji, dan tenaga profesional dapat menjadi cerminan

dari kualitas pendidikan yang akan dihasilkan Lemhannas RI. “Oleh karenanya, pemahaman dan persepsi yang sama tenaga pendidik akan mekanisme operasional pendidikan akan mendukung kelancaran serta keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan,” tuturnya.

Menyadari pentingnya kegiatan tersebut, Mohamad Sabrar Fadhillah menekankan empat hal kepada para peserta, yaitu pertama, peserta harus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh rasa tanggung jawab dan disiplin sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kedua, peserta dapat mendalami dan memahami seluruh mekanisme penyelenggaraan program pendidikan serta hal-hal yang baru dalam metode pembelajaran daring menggunakan aplikasi zoom. Ketiga, peserta perlu menghindari ego pribadi dan sektoral secara berlebihan dan meningkatkan profesionalisme, koordinasi, kerja sama serta soliditas dalam penyelenggaraan pendidikan agar dapat mencapai kualitas output dan outcome yang sesuai harapan. Keempat, peserta harus bertindak dan bersikap secara profesional, proaktif, komunikatif, dan mampu

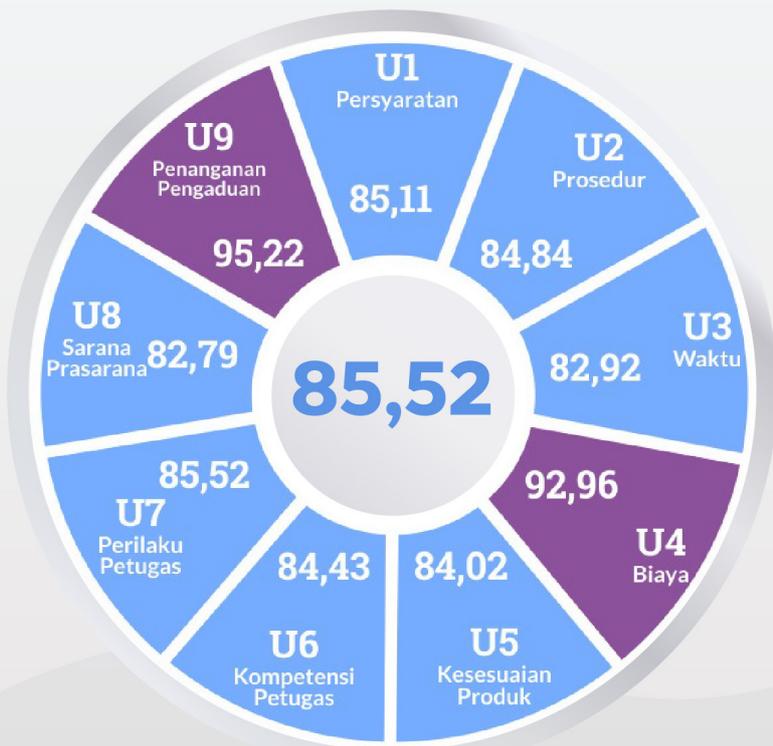
memotivasi serta memiliki karakter dan kemampuan yang dapat dijadikan panutan maupun teladan bagi para peserta didik.

Selanjutnya, Mohamad Sabrar Fadhillah juga berpesan agar kedeputian pendidikan menyiapkan kalender pendidikan dengan menyesuaikan agenda-agenda yang terjadi di tahun depan seperti tentang pemilu, pemilihan presiden, dan lain sebagainya. Hal tersebut harus diantisipasi, sehingga ketika Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) dan kegiatan lainnya tidak saling terkait dan tidak mengganggu dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Dalam Refleksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan tersebut, dilanjutkan dengan paparan oleh Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Marsda TNI Andi Heru Wahyudi yang membahas evaluasi penyelenggaraan pendidikan TA. 2022 dan Tenaga Ahli Pengajar Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI Rido Hermawan, M.Sc. yang membahas evaluasi penyusunan tulisan ilmiah.

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

LEMHANNAS RI
TAHUN 2022



5 Layanan:



Seleksi Penerimaan Peserta PPRA dan PPSA



Penerimaan Mahasiswa Magang



Pelayanan Perpustakaan



Pelayanan Kesehatan



Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

85,52

Kategori Mutu Pelayanan: **B (Baik)**

183 Responden

- 88,31 - 100,0 (sangat baik)
- 76,61 - 88,30 (baik)
- 65,00 - 76,60 (kurang baik)
- 76,61 - 88,30 (tidak baik)



Gubernur Lemhannas RI Berbicara

Lima Kajian Lemhannas RI





Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto menjadi keynote speaker dalam Konferensi Internasional Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi yang mengangkat tema “Innovation and Globalization: The Development of Social, Politics, Administration and Communication Sciences (ICoSPACS)” pada Kamis (10/11) di Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani).

Pada kesempatan tersebut, Andi Widjajanto fokus kepada dua hal dalam paparannya. Dua hal tersebut adalah dinamika geopolitik dan lima fokus utama Lemhannas RI dalam tiga tahun kedepan, yaitu transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, konsolidasi demokrasi dan Ibu Kota Nusantara.

Mengawali paparannya, Andi Widjajanto menjelaskan bahwa Lemhannas RI didirikan pada 20 Mei 1965 oleh Presiden Soekarno. “Presiden Soekarno meminta Lemhannas untuk menjadi sekolah geopolitik. Kami di Lemhannas sampai saat ini harus belajar dinamika geopolitik. Kemudian, kami melaksanakan pelatihan pendidikan dalam bidang strategis untuk membentuk pemimpin nasional masa depan yang paham tentang geopolitik,” ungkapnya.

Terdapat hal penting pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berfokus pada pembangunan manusia dan fokus pada populasi. “Kita sudah akrab dengan istilah

bonus demografi. Tahun optimal bonus demografi Indonesia adalah tahun 2032-2035,” ucap Andi Widjajanto. Ia selanjutnya menjelaskan bahwa dalam kajian Lemhannas RI, bonus demografi bisa optimal jika fokus kepada dua kelompok. Bonus demografi pertama adalah kelompok generasi Y, generasi Z, dan generasi Alfa. Sedangkan bonus demografi kedua adalah kelompok wanita.

“Jadi, kalau kita bisa meningkatkan tingkat produktivitas generasi Y, generasi Z, dan generasi Alfa dan pada waktu yang sama kita meningkatkan tingkat produktivitas kelompok wanita pada populasi kita, maka kita bisa mengoptimalkan bonus demografi yang kita miliki,” jelas Andi Widjajanto.

Selain itu, Andi Widjajanto juga menjelaskan bahwa untuk pembangunan manusia ini Lemhannas RI berfokus pada transformasi digital yang berorientasi pada cara-cara untuk mengubah masyarakat menjadi masyarakat digital. “Pak Jokowi meminta Lemhannas untuk memulai atau menginisiasi kajian tentang demokrasi digital. Itu adalah istilah yang dipakai Pak Jokowi. Bagaimana kita bisa mempunyai demokrasi digital mulai dari pemilu tahun 2024 dan demokrasi digital ini harapannya bisa matang pada pemilu tahun 2034,” ujarnya.

Terkait ekonomi hijau, Andi Widjajanto menyampaikan bahwa transisi energi menjadi pilar utama pada pembangunan ekonomi di

Indonesia. Sedangkan pada ekonomi biru, ia menjelaskan bahwa akan berfokus pada perairan dan laut untuk membentuk ekonomi biru yang lebih tangguh. “Itu akan menjadi fokus kami pada tiga tahun ke depan di kelompok kajian ekonomi di Lemhannas,” katanya.

Lebih lanjut, hal keempat yang harus dikaji oleh Lemhannas RI adalah cara untuk memperkuat institusi politik dengan mengusulkan roadmap konsolidasi demokrasi. Andi Widjajanto menyampaikan bahwa Indonesia harus melaksanakan pemilu demokrasi tujuh kali berturut-turut agar memiliki demokrasi yang matang.

Hal yang terakhir adalah mengenai Ibu Kota Nusantara. Dijelaskan Andi Widjajanto bahwa Ibu Kota Nusantara didesain menjadi smart city, kota digital pertama, dan kota hijau pertama di Indonesia. “Jika kita berhasil membangun Nusantara menjadi kota cerdas, kota digital dan kota hijau atau bahkan kota hutan, maka Nusantara akan dijadikan sebagai prototipe untuk membangun wilayah lain di Indonesia,” tuturnya.

Kelima hal tersebut dibuat kedalam tim yang diusulkan untuk dikaji dengan metode yang lebih praktikal dan lebih berorientasi pada kebijakan sehingga Lemhannas RI bisa menyiapkan rekomendasi kebijakan pada pemerintah.

Bagaimana kita menggunakan kelima pilar termasuk transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, konsolidasi demokrasi, dan Nusantara sebagai pilar untuk menuju Indonesia yang lebih baik dan lebih maju di tahun 2045.

Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto



Menjadi Keynote Speaker, Gubernur Lemhannas RI Bahas Strategic Surprises

Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional “Antisipasi Intelijen di Era VUCA dalam Mendukung Keamanan Nasional untuk Mewujudkan NKRI Emas 2045”. Seminar yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) dan diikuti Civitas Akademika Sekolah Tinggi Intelijen Negara berlangsung pada Selasa (22/11) di Auditorium Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, M.Sc., Kampus STIN, Bogor, Jawa Barat.

Intelijen negara pada dasarnya memiliki peran dalam melakukan deteksi dini dan peringatan dini. Perluasan spektrum dan perubahan paradigma ancaman menuntut peran intelijen yang semakin cepat dan akurat

dalam memberikan informasi, serta dapat menganalisis dengan tajam dan mendalam dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan tertinggi. Untuk itulah intelijen perlu mengantisipasi era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) dalam mewujudkan visi Indonesia emas 2045.

Pada kesempatan tersebut, Andi Widjajanto menyampaikan bahwa para taruna yang sudah dilantik akan memiliki strategic instinct (naluri strategis) dari gabungan pengetahuan dan pengalaman. Melalui strategic instinct tersebut, ia menilai para taruna akan tahu hal yang harus dilakukan ketika melihat suatu anomali. Saat pengetahuan yang dimiliki kuat dan pengalaman yang dimiliki juga dalam, strategic instinct tersebut akan terasah.

“Lalu muncul satu karakter yang ada didepan saya ini. Satu karakter yang ada didepan saya itu disebut sebagai waskita, seseorang yang punya mata, yang punya telinga, yang punya indera yang sangat tajam sehingga kewaspadaannya terus menerus ada,” tutur Andi Widjajanto.

Lebih lanjut, Andi Widjajanto juga menjelaskan tentang body of knowledge intelligence (kerangka keilmuan intelijen). Body of intelligence yang menjadi bagian utama pada kurikulum sekolah, harus memiliki beberapa kemampuan dasar seperti analisis intelijen dan teknis-teknis intelijen dengan kombinasi technical (teknik) intelligence dan human (humanis) intelligence. Menurutnya, Indonesia perlu membentuk intelijen dalam kerangka



Makin komplek
kegiatan intelijen
tetapi sampai
aktivitas intelijen

Sumber: Mengingat dan kegiat...

politik demokrasi dan membutuhkan penguatan interaksi antara intelijen dengan negara.

Kemudian, Andi Widjajanto mengungkapkan metodologi dalam pengajaran yang paling menunjukkan kekhasan intelijen adalah strategic surprises (pendadakan strategis). Ia menjelaskan bahwa strategic surprises merupakan jenis kerangka intel yang cenderung tidak dimiliki oleh ilmu-ilmu lain.

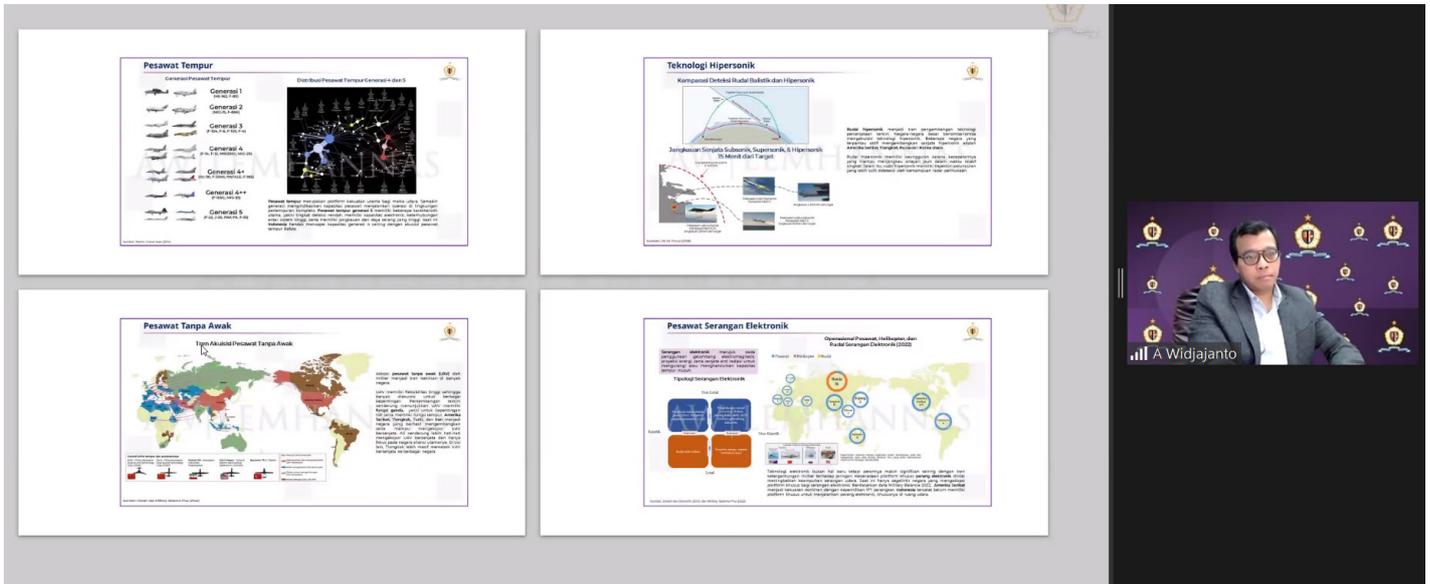
Andi Widjajanto juga menyampaikan kesulitan pada kerangka ini adalah dalam menurunkan ambang batas warning (peringatan). "Strategic surprises akan menunjukkan kegagalan dasar intelijen kalau misalnya kita hari ini berada di ruangan ini mendengar saya paparan lalu tidak ada warning sama sekali, tidak ada noise (bising) tergantikan sama sekali," pungkasnya.





Lembaga Pendidikan
Akan Menjadi

Penjuru Indonesia



“Lembaga pendidikan seperti Akademi Angkatan Udara menjadi salah satu penjuror kita dan akan menjadi salah satu andalan kita, terutama dalam sepuluh tahun ke depan,” kata Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto dalam Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia Akademi Angkatan Udara pada Rabu (23/11) di Gedung Sabat Merauke AAU, Yogyakarta.

Dalam seminar yang mengangkat “Peran Lembaga Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Guna Menghadapi Ancaman Perang Modern di Era Transformasi Digital”, Andi Widjajanto berpendapat bahwa sepuluh tahun ke depan akan terlihat pergeseran yang sangat signifikan dalam bidang teknologi. Beberapa pergeseran tersebut, menurutnya sudah terlihat dengan adanya kombinasi antara elektronik, siber, dan ruang angkasa serta adanya kemunculan senjata-senjata otonom. Oleh karena itu, Andi Widjajanto menekankan bahwa perlu dirumuskan bagaimana Indonesia, terlebih lembaga pendidikan seperti AAU, bisa secara cepat melakukan pergeseran-pergeseran dan menentukan inovasi teknologi.

Menyampaikan paparan dengan judul “Adopsi Perang Udara G5”, Andi Widjajanto menjelaskan bahwa pada

Generasi Perang Udara 5 yang terjadi adalah penguasaan strategis di seluruh matra dan lingkungan. Generasi Perang Udara 5 memiliki empat pilar utama, yakni jaringan, combat cloud, pertempuran lintas medan, dan fusi.

Pilar jaringan meliputi teknologi informasi, teknologi deteksi, kepastian serangan jaringan, dan sistem komando. Combat cloud sebagai pilar kedua merupakan keterhubungan jaringan dan data antarplatform pertempuran udara. Selanjutnya pilar ketiga, yaitu pertempuran lintas medan adalah sinergi lintas domain (darat, laut, udara, ruang angkasa, dan siber) dalam operasi perang. Terakhir pilar fusi, yakni kendali dan komando terintegrasi di tengah arus volume dan arus informasi yang tinggi.

Lebih lanjut, Andi Widjajanto mengingatkan kembali pesan Presiden Joko Widodo pada 5 Oktober 2021 yang mengamanatkan TNI

untuk melakukan transformasi pertahanan dengan melakukan adopsi teknologi untuk membentuk kekuatan pertahanan Indonesia. Transformasi pertahanan tersebut dapat dijadikan sebagai kelanjutan dari proses reformasi militer organisasi pertahanan yang selama ini telah dilaksanakan. “Yang harus Indonesia lakukan, terutama dari ramalan perkembangan teknologi, adalah harus bersiap-siap untuk mengantisipasi teknologi yang akan melompat, yang bahkan nanti akan mengarah kepada evolution military defense,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsda TNI Eko D. Indarto, S.I.P., M.Tr. (Han) serta Ketua Forum Rektor Indonesia Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU, ASEAN Eng. dan Lecturer of Master of Mechanical Engineering Swiss German University (Dosen Program Magister Teknik Mesin Swiss German University) Dr. Edi Sofyan, B.Eng., M.Eng. (Aero).

Lemhannas RI dan SMRC Melaksanakan Survei Ketahanan Nasional



Guna memperkuat pengukuran ketahanan nasional Pusat Laboratorium Lemhannas RI bekerja sama dengan Saiful Mujani Research Center (SMRC) melaksanakan survei opini publik ketahanan nasional. Lebih lanjut, Lemhannas RI melakukan review terhadap hasil survei tersebut melalui Workshop Uji Hasil Survei Ketahanan Nasional pada Kamis (1/12).

Dalam laporannya, Kepala Pusat Laboratorium Lemhannas RI Marsma TNI Suroto, S.T., M.A.P., menyampaikan bahwa hadir empat narasumber dalam kegiatan tersebut, yakni Guru Besar Ilmu Sosial dan Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Saiful Mujani, M.A., Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik Dr. Sarpono, S.Si., M.Sc., Senior Peneliti Kebijakan Departemen Penelitian dan Pengembangan Persepsi Sirojudin Abbas, Ph.D., serta Analis Statistik dan Permodelan Departemen Penelitian dan Pengembangan Persepsi Deni Irvani, M.Si.

“Berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan adalah tekanan yang sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia, apabila kita tidak memiliki ketahanan yang tangguh,” ujar Wakil Gubernur

Untuk memperoleh informasi data kondisi ketahanan yang objektif, tidak bisa hanya bersandar pada satu varian metode penggalan data, akan tetapi perlu didukung dengan beberapa metode penggalan data, yang salah satunya melalui metode survei publik.

Wakil Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah

Lemhannas RI Letjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah saat membuka workshop tersebut. Oleh karena itu, kondisi ketahanan nasional RI harus senantiasa dipantau guna mewaspadai dan menjaga agar kondisi ketahanan nasional RI senantiasa berada pada kondisi yang tangguh.

“Untuk memperoleh informasi data kondisi ketahanan yang objektif, tidak bisa hanya

bersandar pada satu varian metode penggalan data, akan tetapi perlu didukung dengan beberapa metode penggalan data, yang salah satunya melalui metode survei publik,” ucap Mohamad Sabrar Fadhilah. Dirinya juga berharap hasil workshop pada akan semakin memperkaya dan memperkuat analisis data pengukuran ketahanan nasional yang telah dilaksanakan melalui aplikasi Siskurtannas oleh Pusat Laboratorium Ketahanan Nasional Lemhannas RI.

Survei opini publik yang dilakukan sesuai kaidah-kaidah ilmiah merupakan satu cara sistematis untuk memahami sikap dan kecenderungan perilaku masyarakat. Melalui survei opini publik, arah kecenderungan sikap dan perilaku masyarakat yang dinamis dapat dideteksi dengan cepat dan dengan sumber daya yang relatif efisien.

Hasil survei juga berguna bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi publik sekaligus sebagai pembandingan terhadap hasil pengukuran ketahanan nasional yang selama ini telah dilakukan oleh Pusat Laboratorium Ketahanan Nasional Lemhannas RI melalui aplikasi Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (Siskurtannas).

Gubernur Lemhannas RI: Indonesia Bisa Melompat Menjadi Negara Ekonomi Maju Dengan Memanfaatkan Bonus Demografi

Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto bertindak sebagai pembicara kunci pada seminar nasional Perkumpulan Profesi Manajer dan Administrator Pendidikan Indonesia (Promapi) dengan tema “Mengokohkan Eksistensi PROMAPI Dengan Turut Serta Membangun Generasi Muda Dalam Menyongsong Puncak Bonus Demografi Indonesia 2030” secara virtual pada Sabtu (3/12).

Ketua Promapi Dr. Taufani Chusnul Kurniatun, M.Si saat dalam sambutannya mengungkapkan bahwa bonus demografi akan memuncak di tahun 2030. Usia produktif yang akan mendominasi struktur penduduk di Indonesia akan memberikan tantangan untuk membangun generasi produktif yang dapat memberikan kontribusi pada pencapaian visi Indonesia 2045.

Visi Indonesia 2045 yang dimaksud yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dan merata dengan kualitas

manusia yang lebih tinggi, menjadikan ekonomi Indonesia menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia, serta pemerataan yang berkeadilan di semua bidang pembangunan dalam bidang NKRI yang berdaulat dan demokratis. Hal tersebut disampaikan.

“Organisasi Promapi berkomitmen untuk membentuk sumber daya manusia pendidikan yang berperan dalam pembangunan manusia yang unggul dalam karakter, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki kesadaran terhadap ketahanan nasional,” tutur Taufani Chusnul Kurniatun.

Bertindak sebagai pembicara kunci, Gubernur Lemhannas RI meramalkan Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi pada tahun 2028 hingga 2030. Pada saat itu, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 300 juta orang sementara penduduk di dunia mulai bergerak dari delapan menuju sembilan miliar. “Bonus demografi yang diramalkan akan kita dapatkan delapan (sampai) sepuluh

tahun ini menjadi modal dasar kita untuk mengembangkan Indonesia kedepan,” ujar Gubernur Lemhannas RI.

Andi Widjajanto menyampaikan bahwa Indonesia saat berada di posisi yang relatif baik dan bisa menjadi negara ekonomi maju dengan memanfaatkan bonus demografi pada tahun 2028 sampai tahun 2030. Disampaikan pula bahwa Indonesia dapat mengoptimalkan bonus demografi untuk melakukan transformasi ekonomi.

Bonus demografi bisa mendapatkan nilai maksimalnya jika sumber daya manusia (SDM) yang berada pada bonus demografi tersebut mampu menjalankan transformasi digital, mampu mentransformasikan ekonomi Indonesia dalam koridor ekonomi hijau maupun ekonomi biru, serta mampu mengembangkan hub-hub (jaringan) baru yang menjadi bagian integral dari rantai pasok global yang diawali dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara.





Kebebasan Pers dalam Perspektif Ketahanan Nasional

Dr. Ninik Rahayu S.H., M.S.

Tenaga Profesional Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI

Sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat maka kemerdekaan pers memiliki kedudukan strategis guna mendukung kehidupan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD N RI Tahun 1945. Selain itu hak untuk mendapatkan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia guna menegakkan kebenaran dan keadilan serta menjadi pilar dalam memajukan kecerdasan kolektif dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Kebebasan pers merupakan tuntutan hakiki yang mutlak diperlukan untuk menjaga objektivitas dan independensi. Dengan begitu pemberitaan dapat disampaikan kepada masyarakat dengan sebenar-benarnya tanpa rasa takut dibawah ancaman atau tekanan dari pihak manapun. Sebagai salah satu elemen demokrasi, keberadaan pers harus tetap dijaga agar senantiasa profesional dan bertanggungjawab dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip independensi, jujur, imparial, berimbang dan objektif.

Selain itu, dalam perkembangannya teknologi telah mengantarkan pers pada revolusi media pers berbasis internet yang lebih terbuka, cepat dan efisien. Hal ini didorong oleh pesatnya penetrasi internet di Indonesia. Berdasarkan data *we are social-Hootsuite* seperti yang dilansir *detik.com*, per Januari 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat hingga 27 juta orang. Sementara lamanya waktu yang digunakan dalam mengakses internet juga meningkat, dari 7 jam 59 menit menjadi 8 jam 52 menit.

Revolusi media pers juga berdampak pada perkembangan sumber dan pencari berita yang tidak terbatas dari profesi wartawan/

jurnalisme tetapi juga apa yang disebut sebagai jurnalisme warga (*citizen journalism*) maupun jurnalisme independen. Dalam praktek akhir-akhir ini keberadaan mereka justru begitu dominan melalui inisiatif platform pemberitaan yang dibuat secara online.

Di satu sisi revolusi media dapat berperan positif dalam memberikan akses lebih luas kepada publik terkait dengan informasi maupun pemberitaan yang akurat, relevan, dan berbasis data. Namun, disisi lain revolusi media juga menjadi lahan subur tumbuhkan misinformasi, hoaks, pornografi dan kekerasan seksual berbasis online, serta ujaran kebencian.

Hambatan Kebebasan Pers

Meskipun sudah lebih dari 20 tahun semenjak komitmen kebebasan pers melalui UU No. 40 tahun 1999 di canangkan, namun tindakan yang mendistorsi bahkan mendestruksi kebebasan pers masih saja terjadi. Laporan AJI menunjukkan bahwa situasi kebebasan pers di Indonesia sepanjang 3 Mei 2020 - 3 Mei 2021 mencatat ada 90 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang Mei 2020 hingga Mei 2021. Jumlah ini menjadi yang terbanyak dalam 10 tahun terakhir pada periode yang sama. Intimidasi (28 kasus) dan perusakan alat dan atau hasil liputan (22 kasus) merupakan kekerasan dominan yang dialami jurnalis. Disusul kemudian kekerasan fisik (19 kasus), ancaman kekerasan atau teror (9 kasus), dan pemidanaan/kriminalisasi (6 kasus).

Laporan yang sama juga mencatat masih intennya serangan digital yang ditujukan untuk mengganggu proses kerja-kerja jurnalis. Hal

ini belum mendapatkan perlindungan yang memadai. Kekerasan seksual juga masih kerap terjadi meskipun sering tidak dianggap/dilupakan. Hal ini khususnya terjadi pada jurnalis perempuan. Survei yang dilakukan AJI Jakarta (2020) cukup mengejutkan bahwa terdapat 25 dari 34 jurnalis yang menjadi responden, mengaku pernah mendapatkan kekerasan seksual saat menjalankan kerja-kerja jurnalistiknya.

Perspektif Ketahanan Nasional

Terlepas dari persoalan dan tantangannya, kedudukan dan fungsi pers sebagai *knowledge/information intermediary* adalah strategis khususnya jika dikaitkan dengan dampak perubahan (*transformasi*) sosial yang ada. Perubahan itu sekarang begitu nampak pada indikasi tingginya kebutuhan publik akan informasi yang cepat, akurat dan mencerdaskan. Narasi dan informasi yang dimunculkan oleh pemberitaan tidak bisa diangkat telah mempengaruhi cara sikap, perspektif, bahkan perilaku dalam relasi dan interaksi sosial masyarakat Indonesia. Kondisi ini sejalan dengan konsep sekaligus analisis ketahanan nasional, dimana dalam aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti politik, ekonomi, sosial, keamanan, dan pertahanan telah menjadi diskursus yang dikembangkan melalui media pers.

Secara mendasar Ketahanan nasional merupakan isu strategis yang berkaitan dengan kondisi suatu negara bangsa (*nation state*) dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Konsep ketahanan nasional sudah dikenal sejak tahun 1968 dimana menurut lembaga ketahanan nasional merupakan kondisi yang dinamis dari bangsa Indonesia yang didalamnya terdapat daya tahan dan keuletan dalam menghadapi segala bentuk ancaman, gangguan maupun ancaman baik dalam dalam maupun luar negeri. Konsep dasar ini penting dan sejalan dengan konsep negara kesejahteraan yang didalamnya membutuhkan prasyarat tentang daya tahan dan kekuatan nasional. Pendekatan kesejahteraan dalam lingkup ketahanan nasional berjalan seiring sejalan dengan pendekatan keamanan, dimana relasi keduanya sangat saling mempengaruhi. Pendekatan kesejahteraan dan keamanan menjadi bagian yang harus dijalankan secara seimbang dan proporsional serta tidak bisa

ditempatkan dalam kerangka yang saling menegasikan.

Melalui pers yang independen, merdeka dan bertanggungjawab maka perubahan (transformasi) sosial, struktural dan kultural dapat dilakukan. Masifnya informasi yang objektif akan membangun narasi kolektif yang cerdas sehingga berkontribusi pada pembangunan kesadaran public. Pada saat itulah interseksi antara peran pers dan ketahanan nasional dipertemukan. Dalam perspektif ketahanan nasional kesadaran kolektif sangat dibutuhkan dalam internalisasi kondisi diri dan lingkungan serta menjadi unsur strategis dalam mempertahankan integritas kedaulatan negara dan bangsa. Pendekatan kesejahteraan juga memiliki linieritas dengan pembangunan pers yang merdeka, professional dan bertanggung jawab. Itu artinya hambatan terhadap perkembangan pers akan berdampak pada peningkatan risiko ancaman ketahanan nasional.

Akhirnya, perkembangan pers yang merdeka, professional dan bertanggungjawab akan memiliki kontribusi positif dalam mewujudkan konsep ketahanan nasional yang berlandaskan trigatra maupun pancagatra. Perspektif ketahanan nasional dibutuhkan dalam pembangunan dan pengembangan pers, sehingga orientasi dan wujud pengabdian pers tidak keluar dari kepentingan bangsa dan negara yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Begitu juga sebaliknya, dalam perspektif pers yang merdeka, professional dan bertanggungjawab, maka gagasan ideal ketahanan nasional akan menjadi narasi yang mencerdaskan dan memberdayakan guna mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.





Revitalisasi Peran Lemhannas RI Menuju World Class Institution

Dr. Djoharis Lubis, M.Sc.

Tenaga Profesional Bidang Demografi dan Kepemimpinan Lemhannas RI

Usia Lemhannas RI sejak didirikan Bung Karno Tanggal 20 Mei 1965 telah mencapai 57 Tahun dan telah menghasilkan alumni-alumni Lemhannas RI yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan maupun non pemerintahan di dalam negeri maupun di luar negeri, menghasilkan berbagai kajian strategis yang disampaikan kepada Presiden agar NKRI tetap utuh di era globalisasi ini, dan penyelenggaraan pematapan nilai-nilai kebangsaan kepada berbagai komponen masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, organisasi profesi dan lain sebagainya.

Bung Karno mencita-citakan Lemhannas RI agar dapat berperan bagi bangsa dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan masa depan terutama di zaman globalisasi yang penuh ketidakpastian ini. Hal ini menyadarkan dan memicu untuk mendukung dan meneruskan perjuangan Bung Karno baik di dalam negeri maupun di dunia Internasional dalam bidang ketahanan nasional agar bangsa Indonesia semakin bermartabat di mata bangsa-bangsa di seluruh dunia. Untuk itulah diperlukan revitalisasi peran Lemhannas RI menuju world class institution.

Lemhannas RI dibawah Kepemimpinan Gubernur Andi Widjajanto tengah berfokus pada isu-isu strategis yang dihadapi bangsa yaitu tentang green economy, blue economy, konsolidasi demokrasi, transformasi digital, dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam Jangka Panjang, Lemhannas RI dapat lebih berperan menjadi sebuah Institusi yang lebih bermartabat di tingkat dunia dalam menciptakan perdamaian dunia, mendidik calon-calon pemimpin dunia baik dari Indonesia maupun mancanegara, dan berkontribusi dalam menghadapi tantangan global yang penuh ketidakpastian melalui penyusunan grand design, road map, master plan, dan rencana aksi Lemhannas RI ke depan.

Menjadi World Class Institution

Thomas F. Friedman dalam bukunya "The World is Flat" mengatakan bahwa saat ini kita memasuki era

baru Globalisasi tahap ke 3 yang mengerutkan dunia yang kecil menjadi mungil dimana dunia flattening atau rata. Kita harus berlari cepat untuk bisa tetap berada ditempat. Umat manusia, telah melalui tiga tahap globalisasi. Globalisasi pertama kekuatan pendorongnya Negara. Globalisasi kedua kekuatan pendorongnya perusahaan. Sedangkan Globalisasi ketiga kekuatan pendorongnya adalah individu yang harus berkolaborasi dan bersaing secara global.

Saat ini, kita memasuki Tahapan ke 4 dan ke 5 Globalisasi sejalan dengan perkembangan inovasi Industri 4.0 dan Industri 5.0 dengan kekuatan pendorongnya Kolaborasi Transformasi Digital, Robotic, Artificial Intelligence, dan Internet of Things. Dalam persaingan global, baik individu maupun kelembagaannya akan dinilai kelasnya berdasarkan International Standard Performance Indicators untuk dapat dikategorikan sebagai world class institution.

Mengkorelasikan ungkapan Friedman dengan pengertian World Class Institution dengan cita-cita dan harapan Lemhannas RI yang memiliki prestasi nasional maupun internasional yang ditandai adanya kepercayaan negara sahabat mengirimkan kader-kader terbaiknya mengikuti pendidikan di Lemhannas RI sehingga mampu bersaing secara global dan sebagai upayanya untuk naik kelas menjadi world class institution. Menurut Kamus Webster, disebutkan bahwa World Class Institution adalah "Ranking among the foremost in the world, of an international standard of excellence" (menduduki ranking di antara yang terdepan di dunia, mempunyai standar keunggulan internasional).

Untuk menjadi world class institution, Philip G Albach dalam The Costs and Benefits of World Class Higher Education Institution (2005), menyampaikan sepuluh kriterianya, yaitu (1) Memiliki Keunggulan dalam riset yang memenuhi standar internasional dan menjadi rujukan Lembaga sejenis di tingkat internasional. (2) Keunggulan dalam tenaga-tenaga akademis berkualitas internasional di bidang studinya. (3) Keunggulan dalam kebebasan akademik dan kegairahan intelektual. (4) Keunggulan manajemen dan governance. (5) Memiliki Fasilitas

berstandar internasional untuk pekerjaan akademis (perpustakaan yang lengkap, laboratorium yang mutakhir, staf pengelola yang berkualitas). (6) Pendanaan yang memadai untuk menunjang proses belajar mengajar dan riset. (7) Keunggulan dalam kerjasama internasional dalam program akademis dan riset. (8) Menghasilkan alumni-alumni yang memiliki wawasan dengan reputasi internasional. (9) Kurikulum yang mengakomodasi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (10) Lembaga yang memiliki karakter untuk dapat dijadikan rujukan bagi lembaga pendidikan dan pengkajian strategis sejenis di seluruh dunia.

Disadari, Lemhannas RI, tentu tidak serta merta dalam waktu singkat dapat memenuhi semua kriteria di atas. Namun, dalam jangka panjang agar Lemhannas dapat naik derajatnya ke tingkat dunia, mengingat juga terdapat sejumlah peserta mancanegara yang mengikuti pendidikan di Lemhannas RI dan ada kegiatan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN). Maka dari itu, sudah selajaknya sepuluh kriteria tersebut dapat dijadikan rujukan bagi Lemhannas RI.

Langkah Strategis Lemhannas RI Menjadi World Class Institution

Untuk mewujudkan Lemhannas RI menjadi world class institution, tentu memerlukan waktu dan kerja keras seluruh jajaran Lemhannas termasuk para alumninya. Terkait hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut. Langkah strategis pertama, membuat Grand Design, Road Map, Master Plan, Rencana Strategis, dan Rencana Teknis Tahunan. Sebagai salah satu acuannya dapat menggunakan sepuluh kriteria seperti telah dikemukakan di atas.

Langkah strategis kedua, melakukan Institutional Study dan memetakan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana kerja, standar kerja baik dari sisi input, proses, output, effect maupun impact-nya di jajaran Lemhannas RI guna memenuhi sepuluh kriteria dimaksud di atas, salah satu diantaranya adalah revitalisasi Assessment Center di Lemhannas RI beberapa waktu lalu dan menjadi langkah awal yang strategis.

Langkah strategis ketiga, berdasarkan Man Power Planning yang telah disusun, dilaksanakan Training Need Survey dan Training Need Assessment sebagai dasar penyusunan kurikulum dan program pendidikan/pelatihan untuk tenaga pengajar/pejabat struktural maupun non struktural serta staf di lingkungan Lemhannas RI. Langkah strategis keempat, secara bertahap mencari sumber-sumber pendanaan yang bersifat hibah, baik dari dalam dan luar negeri.

Langkah strategis kelima perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk menjadi Tenaga



Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji dan Tenaga Ahli Profesional melalui sistem rekrutmen yang memenuhi syarat-syarat akademis di setiap bidang studi diampunya dengan kualitas yang memenuhi standar nasional maupun internasional namun tetap berkarakter Indonesia.

Langkah strategis keenam, terkait dengan kemampuan Lemhannas RI dalam merekrut dan mendidik calon-calon pemimpin nasional sesuai profesinya masing-masing secara profesional dan proporsional termasuk juga para diaspora Indonesia, expatriat Indonesia di luar negeri, para tokoh-tokoh masyarakat yang vokal dan anti pemerintah yang direkrut secara selektif untuk mengikuti pendidikan dan pementapan nilai-nilai kebangsaan di Lemhannas RI. Langkah strategis ketujuh, membangun kerjasama dengan lembaga sejenis di tingkat internasional dan saling belajar, saling membesarkan dan saling menguntungkan.

Langkah strategis kedelapan, memperkaya substansi program studi andalannya yang khas Indonesia di bidang ketahanan nasional seperti ideologi, empat konsensus dasar bangsa, hubungan internasional, public policy, geopolitik dan keamanan global, strategi, kewaspadaan nasional, wawasan nusantara, sistenas, kepemimpinan nasional dan

lain sebagainya. Diharapkan ke depan, Lemhannas RI dapat menjadi tempat terciptanya pengetahuan, pemikiran, gagasan, teori, dan teknologi baru di bidang ketahanan nasional yang memancar tiada henti.

Langkah strategis kesembilan, peningkatan peran dan kontribusi Lemhannas RI dalam pembangunan ketahanan nasional di bidang studi geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, dan keamanan yang menggunakan pendekatan astagatra yang bersifat holistik, komprehensif dan integral sehingga dapat terwujud ketahanan nasional rakyat semesta yang mampu mempertahankan setiap jengkal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan serangan dari pihak-pihak yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang tidak menginginkan tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia di era globalisasi yang penuh ketidakpastian ini.

Mendasari berbagai langkah strategis tersebut, Lemhannas RI perlu menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan IKAL Pusat beserta Komisarariat Provinsi IKAL dengan melakukan Strategic Action Research Gerakan Terpadu Pembangunan Ketahanan Nasional (Gerbang

Tannas) di seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota hingga ke desa-desa percontohan terutama di wilayah konflik dan perbatasan negara. Hal ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi Lemhannas RI dalam menghasilkan produk dari Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) yang semakin terukur, akurat, dan bermanfaat bagi Presiden RI dalam menentukan berbagai kebijakan nasional.

Kebanyakan lembaga tinggi yang berkelas dunia, memiliki warisan budaya yang kaya akan sejarah keberhasilan masa lalunya. Kejayaan Indonesia pada masa lalu ada pada masa Kerajaan Majapahit. "Tanhana Dharmma Mangrva" yang hidup di masa tersebut sebagai simbol kejayaan masa lalu, sangatlah tepat yang kini menjadi semboyan Lemhannas RI.

Untuk mewujudkan Lemhannas RI sebagai world class institution, diperlukan Grand Design Revitalisasi Lemhannas RI Menuju World Class Institution beserta langkah strateginya guna memenangkan persaingan global. Selain itu, kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Lemhannas RI beserta para alumninya dengan disertai adanya Man Power Planning dan Institutional Study kelembagaan serta pendanaan yang mendukungnya.



Refleksi Kesadaran Geografi Kita

Sukendra Martha

Tenaga Profesional Bidang Geografi dan SKA Lemhannas RI

Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957 merupakan momentum bersejarah atas perolehan perluasan wilayah NKRI yang diakui dunia lewat UNCLOS 1982. Dijadikannya Hari Nusantara memompa semangat bangsa atas kesadaran geografi kita.

Patut bersyukur, wilayah negara dengan batas-batasnya yang lebih luas telah berhasil diperjuangkan Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja, melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Wilayah negara bertambah dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² (Jurnal Maritim, 13/12/2017). Terdapat penambahan luas sebesar 2,5 kali lipat dari wilayah negara sebelumnya berdasarkan Ordonansi Hindia Belanda, yaitu *Territoriale Zeën en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939* (TZMKO 1939). Ordonansi ini mengatur pulau-pulau di wilayah Nusantara yang hanya berhak atas wilayah perairan, terhitung tiga mil dari garis pantai. Sekarang wilayah laut sekitar yang berada dalam wilayah kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh tak terpisahkan, sebagai wilayah kedaulatan NKRI.

Kesatuan wilayah yang luas itu patut membanggakan kita sebagai bangsa dan sekaligus menjadi modal dasar bangsa yang mesti dijaga. Sebagai negara besar, Indonesia disatukan dalam satu bingkai 'archipelagic state' yang bertaburkan 17.504 pulau. Belum lagi luas bentangannya, panjang garis-pantainya, dan potensi sumber daya alam di dalamnya. Memang itu fakta. Dan kita seringkali hanya mempromosikan fakta kelebihan dan barangkali itulah yang membuat kita lalai. Provokasi Indonesia 'kaya raya', zamrud khatulistiwa dan 'Tanah Sorga' dalam lirik lagu 'Kolam Susu'-nya Koes Plus sebagai 'keunggulan' geografi negeri yang acapkali dinyanyikan atau dengungkan. Kelemahan geografi: 'ring of fire', informasi ragam multi-bencana itu jarang disosialisasikan. Kita menjadi abai dan kurang waspada terhadap bencana (alam) akibat 'kelemahan' geografis tadi. Namun, konsep Geographical Awareness mengingatkan bahwa kita harus selalu care dan aware terhadap kondisi geografi, terlepas dari keunggulan dan kelemahan yang kita miliki.

Artikel Kesadaran Geografi Kita (Kompas, 17/4/2004) yang ditulis Sri-Edi Swasono belasan tahun yang lalu sepertinya masih relevan. Warga negara Indonesia disebut kurang memiliki kesadaran geografi, tak mengenal prinsip ksatria *sedumuk bathuk senyari bumi*. 'Kurikulum modern' dianggap telah mendikte Sejarah dan mengabaikan

pengajaran Geografi. Disamping itu beberapa terbitan Atlas dianggap tidak menggambarkan informasi utuh karena tidak memuat substansi pendidikan Geografi di Indonesia. Di Amerika Serikat misalnya, peningkatan kepedulian dilakukan setiap tahun melalui Pekan Kesadaran Geografi atau Geographical Awareness Week (GAW). Kegiatan ini didukung Kongres melalui *Joint Resolution of Congress of the United States of America*, dan mendapatkan dukungan Presiden Reagan. Payung hukum 'Joint Resolution 1987' itu ternyata memperkuat aktivitas GAW dalam membangun kesadaran pentingnya pendidikan Geografi di dunia modern sekarang ini (Edelson, 2011).

Sejarah keberhasilan Deklarasi Djuanda itu pastinya dapat meningkatkan rasa kesadaran geografi masyarakat. Perjuangan yang mampu menjadikan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang luas dan membanggakan. Persoalannya, bagaimana menjaga dan mengisinya dengan pembangunan. Oleh karena itu kesadaran dan semangat saja tak cukup. Momentum Hari Nusantara terus diperingati untuk menghidupkan semangat Deklarasi Djuanda 1957, sekaligus sebagai refleksi kesadarpedulian geografi kita.

Refleksi itu dapat dilihat dari dua sisi: sebagai wadah dan isi. 'Wadah' adalah cakupan wilayah NKRI dengan batas-batas teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen. Deklarasi Djuanda 1957 merupakan perwujudan konsepsional wadah geografis yang mengintegrasikan seluruh wilayah negeri ini. Deklarasi tersebut memberikan pesan pentingnya geographical awareness bagi bangsa Indonesia. Sementara 'Isi' berarti segala aktivitas membangun pada cakupan wilayah geografis tersebut. Kegiatan memelihara, menjaga lingkungan dan membangun dilakukan guna mengisi wadah tadi. Seperti itulah perwujudan implementatif atas Deklarasi Djuanda itu. Berdasarkan kekuatan 'sadarpeduli' geografi, bangsa ini mampu melancarkan pengelolaan dan pemanfaatan bumi Indonesia untuk kesejahteraan rakyat.

Beberapa masukan sebagai upaya kesadarpedulian geografi yaitu, pertama, dalam artian wadah, diperlukan evaluasi peningkatan kurikulum pendidikan geografi.

Pendidikan yang berorientasi pada kesadarpedulian geografi, terutama melatih penguatan psikomotorik, di samping aspek kognitif dan afektifnya. Dalam konteks luasnya cakupan wilayah, diperlukan perhatian lebih terhadap ilmu-ilmu kebumihan dan Kelautan. Pada Hari Informasi Geospasial (HIG) ke-52 pada 19 Oktober 2021 lalu, Presiden Jokowi telah mengatakan bahwa ilmu Geodesi, Geografi, dan Kartografi itu penting. Menjadi pekerjaan rumah para geografer untuk membuktikan kemanfaatan ilmu-ilmu itu bagi bangsa dan negara. Karena itu pula, perlunya membekali generasi mendatang dengan materi kesadarpedulian geografi, terutama pendidikan geografi yang mencerahkan sejak dini.

Kedua, dalam artian isi, perlunya dukungan semua pihak terhadap aktivitas masyarakat yang secara sukarela bekerja untuk meningkatkan kepedulian geografi. Beberapa contoh keterlibatan komunitas antara lain: (i) Kegiatan Memuliakan Air, (ii) Kegiatan Citarum Harum, dan (iii) Kegiatan Restorasi Sungai, menyadarkan pada masyarakat akan pentingnya air / sungai yang berguna bagi sumber kehidupan manusia. Kegiatan kepedulian geografi di laut perlu dikembangkan seperti pelestarian lingkungan laut, tanam benih ikan, pohon mangrove, terumbu karang, rumput laut dan lainnya.

Ketiga, dalam kaitan wadah dan isinya, kesadarpedulian geografi dilaksanakan secara bersama-sama. Pendekatan Pentahelix (Pemerintah, Akademisi, Pelaku Usaha, Media dan Komunitas) meningkatkan kerjasama dalam bingkai NKRI, terbangunnya wawasan nusantara dan ketahanan wilayah nasional yang tangguh. Indikasinya rasa cinta tanah air menjadi tumbuh. Rasa kepedulian meningkat dengan semakin besarnya kemauan membangun wilayah (darat, laut dan udara). Kepedulian bagi semua anak bangsa menjadi kunci, bahu membahu dalam menjaga, memelihara wilayah NKRI dan mengisinya dengan tindakan pembangunan berkelanjutan yang menyejahterakan rakyat. Tanpa kesadarpedulian geografi, Hari Nusantara sebagai Hari Besar Nasional hanya sebatas seremonial tanpa aksi nyata.



Marsekal Muda TNI Andi Heru Wahyudi yang sejak 29 Juli 2022 mengemban amanat sebagai Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI lahir di kota Malang 55 tahun lalu tepatnya pada pada 5 Maret 1967. Andi Heru adalah anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Mayor TNI (Purn) Oetomo dan Siami. Menurut penuturannya, nama yang diberikan oleh sang ayah tergolong unik, karena terinspirasi pada sosok pemberontak di Sulawesi pada saat itu, "Itu kan rame-ramenya Andi Azis ya, Makassar itu. Jadi ramai-ramainya itu saya lahir makanya Bapak saya ngasih nama Andi Heru, Andi padahal bukan orang Makassar," ujar pria yang menghabiskan masa kecil dan remaja di Kota Malang dan Solo.

Tidak dapat dipungkiri sosok sang ayah lah menginspirasi dan mendukung seorang Andi Heru muda untuk menjadi seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU). "Orang tua saya ini kan TNI Angkatan Udara, bagiannya kalau sekarang itu fasilitas instalasi kalau dulu namanya urtum. Bapak saya beranjak dari seorang Tamtama hingga pensiun itu pangkatnya

Mayor,” ujar pria yang merupakan abituren Akabri tahun 1989.

Menurut Andi Heru, kondisi ekonomi keluarganya saat itu menjadi salah satu alasan kuat yang mendorong dirinya untuk menjadi seorang prajurit, “Saya ini tidak disuruh daftar, tapi saya hanya berpikir orang tua saya ini dari Tamtama sekarang pangkatnya baru Lettu, membiayai anaknya lima orang kuliah, saya hanya ingin meringankan beban orang tua waktu itu,” ungkap Andi Heru. Sang ayah pun turut mendukung penuh keinginannya untuk bergabung dalam Akademi ABRI (Akabri) dengan menyiapkan kebutuhan Andi Heru. “Beliau mengajak saya ke rumah sakit, katanya gini ‘le sebelum kamu daftar saya pengen lihat dulu kondisi kesehatan kamu lihat dalamnya’ akhirnya saya dicek keseluruhan,” tutur pria yang telah menerima Bintang Yudha Dharma Nararya mengingat memori masa remajanya.

Setelah menempuh pendidikan di Akabri, Andi Heru mengikuti seleksi Sekolah Penerbang (Sekbang) dan berhasil menjadi salah satu penerbang pesawat tempur yang dimiliki oleh jajaran TNI AU. “Alhamdulillah saya

ditempatkan pertama kali di Makassar, di Skadron Udara 11 di Makassar. Itu dulu pesawatnya A-4 Skyhawk, itu kalau kata orang dulu itu pesawat yang paling berani mati, ya soalnya berani mati karena sudah mengabdikan di Indonesia mungkin boleh dikatakan 40 tahunan dari sejak 40-50 plus minus sampai kemarin di 2000-an sudah tidak pakai A-4 Skyhawk,” jelas pria pemilik call sign Gator.

Selama menjadi bagian dari Skadron Udara 11 yang berada di Lanud TNI AU Sultan Hasanuddin, Andi Heru juga berkesempatan untuk mengawaki pesawat Sukhoi buatan Rusia baik SU-27 SK maupun SU-30 MK. Bahkan dirinyalah yang berkesempatan untuk mengambil langsung empat pesawat pembelian pertama tersebut ke Negeri Beruang Merah di tahun 2003. “Saya di sana sekolah dididik untuk mengoperasikan pesawat termasuk bersama 18 teknisi yang akan merawat pesawat tersebut,” ungkap Andi Heru yang saat itu masih berpangkat Mayor.

Meski dalam rentang waktu yang terbatas selama menjalani pelatihan terkait pesawat Sukhoi, banyak pengalaman yang menurutnya akan menjadi modal fundamental dalam

kedepannya dalam memanfaatkan pesawat tempur yang dibeli pada era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri tersebut. “Instruktur kita ini orang Rusia, terus panel-panel yang ada di kokpit ini tulisannya Rusia semua gak ada yang bahasa Inggris. Sedangkan dibekali oleh bahasa Rusia ini cuma dua minggu, tapi bisa dengan mereka, dengan memberikan ilmunya ke kita karena kita basic-nya. Karena di sana kita terbang malam aerobatik juga, terbang malam kita air refueling juga, dengan sarana prasarana yang lengkap,” ungkap pria yang juga sempat menjadi instruktur penerbang di Jogja.

Pengalaman lain yang berkesan adalah saat dirinya dan beberapa penerbang muda lain diberikan kesempatan untuk menjadi penerbang yang tampil pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-50 pada 22 tahun silam. “Kalau gak salah kita harus membuat angka 50. Jadi saya kebagian di angka nol, pesawat A-4 Skyhawk dan waktu itu yang penerbangnya adalah anak muda semua. Paling tinggi pangkatnya Kapten sama komandannya Letkol,” tuturnya.

Selama proses latihan formasi, Andi Heru mengakui bahwa hasil yang didapatkan belum

MARSEKAL MUDA TNI

ANDI HERU WAHYUDI

Keikhlasan Tersusun dari Kesabaran
Menerima Takdir Tuhan dan Mensyukuri
Nikmat yang Telah Diberikan

terlalu baik, hal ini lah yang membuat dirinya dan rekan dianggap remeh, mengingat dirinya adalah penerbang muda. “Kita dikatakan nggak bisa, nggak mampu. Waktu itu kita habis latihan dengan New Zealand, habis latihan di Medan kemudian kita gabung ke Madiun untuk menyiapkan angka nol, termasuk 50, 50 tahun waktu itu. Sampai Madiun, yaitu kita dibilang bisa soalnya jelek, selama latihan kita jelek terus terang aja,” ujarnya diselingi gelak tawa. Menurut Andi Heru, dirinya dan rekan-rekannya baru bisa menampilkan formasi terbaiknya tepat saat pejabat yang berwenang melakukan penilaian apakah kelompoknya bisa tampil saat perayaan puncak HUT TNI ke-50. “Ternyata waktu dilihat hasilnya bagus, oke tetap jalan, kita akhirnya main di Jakarta. Jadilah angka 50 yang fenomenal waktu itu dengan notabene kita ini jam terbangnya belum banyak,” ungkap pria yang merupakan alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan 56 Lemhannas RI.

Selama mengawaki pesawat A-4 Skyhawk Andi Heru telah menjalankan penugasan hampir seantero nusantara baik Makassar, Medan, Pekanbaru, Manado, Kupang, Ambon sampai Papua. “Zaman itu kalau saya terbang satu tahun, ada tiga bulan saya di homebase Makassar, sisanya saya di luar daerah atau di tempat-tempat operasi,” tuturnya. Menurut Andi Heru dirinya sudah menjalani berbagai bentuk indinasan termasuk berdinan di ujung timur Indonesia. Jadi paling jauh saya berdinan di Jayapura, jadi Danlanud di Jayapura sana. Kemudian yang di Jawa: Jakarta; di Jogja; yang di Sumatera penugasan-penugasan yang menetap jarang, selain itu di Kendari juga pernah dua tahun, itu cukup lama juga. Yang paling banyak adalah di Makassar sampai pangkat bintang satu, sampai Andi Heru jadi panglima,” tutur pria yang pernah menjadi Pangkosek Hanudnas II Makassar saat masih berada di bawah Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas).

Dari ratusan penugasan dan operasi yang dijalankan olehnya, ada beberapa momentum yang hingga saat ini tidak dapat dilupakan oleh Andi Heru. Salah satunya adalah saat dirinya dan ketiga rekannya melakukan penerbangan dari Pangkalan Udara Iswahyudi, Madiun menuju Pangkalan Udara TNI AU Roesmin Nurjadin di Pekanbaru. Tidak berselang lama dari tinggal landas, rombongan pesawat dihadapkan pada cuaca yang sangat buruk mengingat tebalnya awan mendung yang dihadapi. “Bayangkan dari atas Semarang

sampai dengan Palembang itu kurang lebih satu jam setengah kita di dalam awan terus yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita ini,” tutur mantan Danlanud Silar Papare.

Menurut Andi Heru menjadi seorang penerbang pesawat tempur mewajibkan dirinya untuk menghindari keteledoran dalam mengawaki pesawat jenis apapun. Dibutuhkan pemahaman secara menyeluruh terkait pesawat yang diawaki baik saat di udara maupun saat di darat. “Kalau kita hubungan baik dengan alam, hubungannya baik dengan apa yang sering kita gunakan, termasuk salah satunya adalah pesawat ya kita akan diberikan jalan kemudahan mengatasi masalah yang muncul,” tuturnya.

Dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Andi Heru, dirinya selalu bisa selamat dari berbagai situasi berbahaya yang dihadapinya saat menerbangkan pesawat. “Terkait dengan pengeboman, misi-misi operasi, mengebom dan menembak segala macam, Alhamdulillah kita bisa laksanakan karena kita ngikutin semua prosedur yang ada. Tidak ada kesalahan di situ, kalau ada kesalahan pun kita bisa punya caranya, ada solusinya dan ada langkah-langkah untuk mengatasi kesusahan itu,” jelas Andi Heru. Menurutnya pesawat termasuk salah satu alutsista yang harganya mahal, sehingga saat menerbangkan pesawat tersebut tidak boleh ada satu kesalahan pun. Karena begitu kesalahan terjadi akan berujung pada rusaknya pesawat dan dapat mengakibatkan kerugian negara.

Menurut Andi Heru dengan dukungan dan restu orang tua yang tidak putuslah yang mengantarkannya sampai pada titik kesuksesan. Selain itu sang istri Wahyu Widyawati, adalah sosok yang selalu memberikan dukungan atas segala pencapaian yang didapatkan oleh Andi Heru. Sosok sang istri dinilainya sebagai orang paling sabar serta mau mendukung semua keputusan Andi Heru. “Karena waktu itu kita kalau sudah terbang ya udah pasrah kan sama istri, saya titip anak-anak karena suatu saat kalau saya terbang, enggak tahu apa yang terjadi,” tuturnya.

Andi Heru mengakui baru menemukan tambatan hatinya saat dirinya akan menginjak umur kepala tiga, ketika dirinya sedang menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Perwira Kecabangan Intelijen (Sarpa Intel).

“Kurang lebih empat bulan di Cilendek, Bogor. Disitulah saya memanfaatkan jalan-jalan ke Bandung ketemu lah sama istri saya di situ tahun 1994, kemudian nikah di 1996,” ungkap Andi Heru. Setelah menikahi sang istri, Andi Heru kemudian memboyong istrinya untuk menemani dirinya menjalankan tugas kedinasannya di Makassar dan kemudian dikaruniai oleh dua orang buah hati. Anak pertamanya lahir di tahun 1997 diberi nama Bayu Angkasa Utama, dan putra kedua yang lahir di tahun 2000 bernama Muhammad Sakti Bintang Utama di mana keduanya terinspirasi dari nama ayah Andi Heru.

Bagi Andi Heru keluarganya adalah sosok-sosok yang mengantarkan kesuksesannya menjadi seorang prajurit. “Memang apa yang kita capai tidak semena-mena hanya kita sendiri tidak. Semua apa yang kita capai berkat khususnya adalah orang tua, restu orang tua kemudian dukungan dari istri,” tutur Andi Heru.

Andi Heru mengajarkan anak-anaknya untuk tidak semena-mena dalam berbuat dan bersikap serta mandiri meski dirinya saat ini adalah perwira tinggi di TNI AU. “Malah mungkin anak Andi Heru nggak tahu pangkat Andi Heru sekarang sudah naik ke bintang dua, taunya masih jenderal-jenderal aja,” tuturnya.

Meski dirinya terbilang sukses meniti karir sebagai seorang prajurit TNI, Andi Heru tidak menuntut anak-anaknya untuk mengikuti jejaknya. “Kalau saya dalam prinsip tidak memaksakan jadi apa. Karena kalau saya paksakan dia harus masuk [Akademi Militer], kalau gagal kan percuma juga. Apalagi terus mengatasnamakan bapaknya akhirnya dia bisa lulus kalau lulus belum tentu juga di pendidikan selama karirnya juga lebih bagus dibanding yang diharapkan dan itu adalah cita-citanya anak,” ungkap Andi Heru.

Mengingat resiko pekerjaan penerbang yang tinggi, Andi Heru menanamkan prinsip kepada keluarganya untuk tidak berutang. “Kalau saya [tidak] berutang suatu saat dipanggil, suatu saat ada apa-apa, keluarga atau waris yang kita tinggalkan ini tidak memiliki utang. Entah itu utang apa aja,” ucapnya. Dengan tidak memiliki utang, menurutnya adalah salah satu mensyukuri rezeki yang diterimanya selama ini.

Lebih jauh, ada prinsip hidup yang selalu menjadi pedoman Andi Heru dalam menjalani



karir keprajuritannya, yang menurutnya tidak semua orang mampu untuk menerapkannya. “Ada satu yang mungkin orang bilang sulit untuk dilakukan, yang namanya ikhlas. Ikhlas itu tingkatannya paling tinggi dan itu berat untuk kita bisa mengarah ke sana,” tutur pria yang pernah menjabat Komandan Pusat Latihan (Danpuslat) Kodiklat TNI di tahun 2020. Menurut Andi Heru di dalam keikhlasan tersusun dari kesabaran menerima takdir tuhan dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Kesabaran yang dimaksud adalah adalah siap menerima segala bentuk titipan tuhan baik materil maupun immateril. “Jadi jangan [sedih] nanti kalau diambil sama Yang Kuasa, karena itu titipan mari kita sabar kita ikhlas,” ujarnya. Hal ini ditunjukkan oleh Andi Heru dalam setiap amanah jabatan yang pernah diemban olehnya, mengingat pangkat dan jabatan adalah sebuah kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. “Jadi saya tidak meminta. Alhamdulillah dikasih, siap laksanakan akan saya tunjukkan yang terbaik menurut saya. Kalau saya kerja, saya tidak memikirkan a-b-c-d-nya, yang penting saya akan tampilkan yang terbaik buat dinas ini, buat organisasi, buat negara ini” tuturnya tegas.

Bagi Andi heru seberat apapun tugas, tantangan, dan tanggung jawab yang dihadapinya dapat diselesaikan selama

memiliki kewaspadaan, kesiapan, dan solusi dalam menghadapinya. “Menghadapi permasalahan yang di atas seperti itu kita bisa keluar dari permasalahan itu ya karena kita sudah disiplin, bahan kita ada kemudian kita bisa mengerti tentang kiri kanan atas bawah kita bisa menerima masukan dari siapapun sehingga kita bisa terhindar dari marabahaya tersebut,” jelasnya.

Sebelum menjabat sebagai Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Andi Heru sempat menjadi seorang Tenaga Ahli Pengajar Bidang Sistem Manajemen Nasional Lemhannas RI sehingga mampu telah memiliki bekal awal untuk memahami dinamika akan dihadapi saat dirinya menjabat sebagai sebagai seorang Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI. “Memang cukup berat tugasnya, karena namanya [lembaga] pendidikan itu ada satu sistem yang harus kita benahi, sehingga harapan dari tugas pokok Lemhannas sebagai [lembaga] pendidikan untuk memunculkan, menuntaskan, atau memberikan bekal kepada para peserta menjadi pemimpin-pemimpin yang nasionalis, pemimpin strategik, pemimpin yang bisa menjawab tantangan masa depan,” jelasnya.

Menurut Andi Heru, sistem pendidikan di Lemhannas RI harus bisa menyesuaikan

dengan dinamika dan konstelasi geopolitik yang berlangsung di berbagai tingkatan, baik nasional, regional maupun global. Penyesuaian sistem pendidikan yang diterapkan penting dilakukan untuk menyatukan, menyelaraskan, dan menyamakan pemahaman bagi para peserta pendidikan baik pada Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA), Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA), serta Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan (P3DA). “Banyak yang harus kita benahi, dari sumber daya manusianya, kemudian materinya, pembelajarannya itu sendiri. Kemudian kita sudah mengarah kepada WTP, ya mari kita tertibkan administrasi kita untuk menyelesaikan semua [administrasi] yang ada di dalam [sehingga] tidak menyalahi aturan,” tegasnya. Menurut Andi Heru saat ini Kedeputian Dikpimnas berisikan dengan personel dan tim yang solid. “Saya punya anggota-anggota yang mungkin sudah berpengalaman di dunia kependidikan apalagi di Lemhannas ini cukup lama dan dari tangan-tangan beliau-beliau proses pembelajaran pendidikan ini bisa berjalan,” ujarnya.

Saat ini Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional juga sedang mengkaji kebijakan Gubernur Lemhannas RI terkait penambahan jumlah peserta PPRA dan PPSA. “Selama ini kita hanya menerima 100 [peserta] PPRA dan 100 [peserta] PPSA, ke depan bisa nggak kita buat menjadi 200 jumlah pesertanya. Tentunya itu ada kajian-kajian yang akan kita sampaikan ke beliau [Gubernur Lemhannas] dan tentunya juga itu menjadi dasar agar supaya bisa menjadi menerima 200 peserta [peserta],” jelasnya.

Peningkatan kuantitas peserta pendidikan memang tidaklah sederhana karena akan bersinggungan dengan tenaga pendidik, infrastruktur, dan segala elemen yang menyangkut proses pembelajaran. “Itu masih wacana baru kita kaji ya syukur-syukur dalam waktu dekat ini bisa kita perbaiki atau mengarah menuju ke dengan jumlah peserta 200 supaya bisa terakomodir keinginan masyarakat, keinginan instansi, keinginan Ormas, yang membutuhkan pendidikan di Lemhannas ini,” lanjut Andi Heru. Dirinya juga menuturkan untuk mendidik pemimpin nasional dibutuhkan koordinasi, kerjasama, dan kekompakan seluruh personil Lemhannas RI sehingga proses pendidikan bisa berjalan aman dan lancar.

Maulida Arbaningsih, S.S.T. atau yang akrab dipanggil Maul lahir di Wonosobo 28 tahun silam. Lahir sebagai anak bungsu dari empat bersaudara, Maulida tumbuh menjadi anak pemberani dan sedikit 'bandel'. Wanita yang saat ini bertugas di Biro Humas Settaga Lemhannas RI sebagai Pranata Humas Ahli Pertama ini menuturkan dirinya lebih banyak memiliki teman laki-laki semasa kecilnya.

"Kalo dari kecil, dari TK, suka main di rumah temen dan suka lupa waktu. Sampai suka dijemput orang tua kesana. Kalo SD itu dulu suka mainnya sama cowok. Jadi suka banget yang namanya main bola. Main sepak bola kayak gitu. Itu pas kelas 3 SD," jelasnya sembari tertawa.

Siapa yang menyangka bahwa ASN yang mendapatkan peringkat satu saat menempuh Pelatihan Dasar ini juga pernah gemar bermain game

MAULIDA

Arb

HUMAS

online saat menempuh pendidikan di SMK negeri Wonosobo. "Waktu itu lagi booming game online di warnet. Jadi bisa dari pulang sekolah sampai magrib, sampai bis terakhir ke arah rumah, masih main di warnet. Pulang ke rumah pasti sudah magrib dan itu hampir tiap hari," jelasnya sambil tertawa mengingat "kebandelannya" ketika remaja.

Namun kebandelannya terhenti ketika Maul memasuki masa perkuliahan di Multimedia Training Center, Jurusan Penyiaran, Yogyakarta. Dirinya mengungkapkan disitulah rasa tanggung jawab dan mandiri terhadap diri sendiri muncul. Ia lebih fokus mencari relasi dengan teman-teman perkuliahannya.

"Kalo waktu kuliah kan udah ngekost sendiri, jadi kita kan bertanggung jawab dengan diri sendiri gitu. Mungkin karena waktu masih di rumah serba dilarang, pulang jam berapa atau maksimal harus jam sembilan sudah di rumah dan semacamnya jadi waktu kuliah itu nyobanya ikut nongkrong, pulang pagi, tapi dalam hal yang positif ya. Ngobrol-ngobrol sampe malam. Itu aja si. Mencari relasi dan teman," tuturnya.

Maul kembali menuturkan bahwa merantau ke Yogyakarta pada saat itu juga membentuk karakter dirinya. "Merantau itu lumayan membentuk. Bertemu dengan orang lain, bertemu dengan banyak orang dari Sabang sampe Merauke, dan juga dengan berbagai macam profesi. Itu termasuk yang cukup ngebentuk menjadi lebih dewasa atau harus berfikir logis," jelasnya.

Berbeda dengan jurusannya semasa SMK, Maulida menuturkan bahwa jurusan penyiaran

dipilihnya karena keinginan orang tuanya. "Sebenarnya aku termasuk anak bungsu yang nurut sama orang tua. Jadi dari kecil sampe kuliah tu ngikut maunya orang tua sekolah dimana dan alhamdulillahnya mampu untuk memberikan prestasi sesuai keinginan orang tua," ucapnya.

Saat menempuh jenjang kuliah tersebut, Maul juga bekerja sebagai video editor di sebuah production house selama tiga hingga tahun 2017. Di tahun 2018, Maul bekerja di Telkom selama satu setengah tahun sebagai staf call center yang kemudian diangkat menjadi quality assurance.

Berbekal pengalaman bekerja itu, Maul mengikuti seleksi CPNS di tahun 2018 di Lemhannas RI menuruti keinginan orang tuanya. Meskipun menjadi seorang ASN bukanlah keinginannya, dirinya bertekad merubah stigma yang melekat di pada profesi ASN. "Karena ASN itu kan identik dengan bekerja santai. Jadi ingin mematikan stigma semacam itu. Kalo PNS itu gak Cuma kayak gitu apalagi sekarang banyak anak muda yang memang dia mau berkarya" jelas Maulida.

Dirinya kembali menuturkan bahwa sistem di ASN juga belum stabil secara kelembagaan maupun nasional juga terus dibenahi. "Kadang masih ada sistem yang belum stabil. Sistem secara nasional maupun sistem di lembaga itu sendiri. Mungkin berbeda dengan swasta dan BUMN, yang dipaksa untuk mengikuti perkembangan zaman, yang kalo ASN itu masih pelan-pelan, alon alon asal kelakon gitu kan. Jadi kita yang harus berusaha," tuturnya.

Setelah hampir empat tahun menjadi ASN,

Maul mengungkapkan bahwa dirinya merasa beruntung dapat bekerja dari rumah selama pandemik Covid-19 melanda. Menurutnya, tidak semua pekerja bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja di rumah selama Covid-19 tanpa khawatir akan adanya pemutusan kerja. "Sukanya jadi PNS tu saat pandemi kemarin karena selain bisa kerja dari rumah, ketika orang-orang mengkhawatirkan tentang PHK, sebagai PNS alhamdulillahnya masih dicover oleh pemerintah. Meskipun ada potongan, tapi masih ada gaji dan masih stabil," ungkapnya.

Selain itu, jam kerja menjadi ASN khususnya di Lemhannas RI juga ia nilai mendukung perannya sebagai ibu bekerja. Ibu dari Nadif Ar Rayyan ini merasa jam kerja Lemhannas RI dari jam 7 pagi hingga jam 3 sore membuat dirinya dapat membagi perannya di kantor dan di rumah. "Jam kerjanya khususnya di Lemhannas, jam tujuh sampai jam tiga sore dan dari Senin sampai Jumat. Ya memang waktunya itu berkurang di jalan tapi setidaknya jam kerjanya itu tetap," terangnya.

Secara kontekstual, Maul mengatakan bahwa pekerjaannya sebagai abdi negara kerap diibaratkan dengan berusaha sekuat tenaga dan sepenuh hati memberikan yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan masa depan bangsa yang lebih baik. Namun menurutnya, abdi negara dapat diartikan dengan lebih sederhana yaitu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan norma yang berlaku, tidak melakukan korupsi dan tidak merugikan negara.

Di akhir wawancara, ASN yang menjalani prinsip hidup seperti air mengalir ini berharap ke depannya Lemhannas RI dapat memproyeksikan SDM nya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. "Ketika pekerjaan itu diberikan orang yang tepat, itu akan memberikan perubahan yang cukup besar. Tapi kalo misalkan satu orang dipaksa untuk mengerjakan dua atau tiga pekerjaan dari jabatan lain, pasti gak akan maksimal", ungkapnya.

Dirinya juga berharap Lemhannas RI dapat terus mengikuti perkembangan teknologi serta mengesampingkan ego sektoral.

loaningsih

Menyeimbangkan Karir dan Membesarkan Anak

Presiden Jokowi: Indonesia Berada di Puncak Kepemimpinan Global

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia saat ini berada di puncak kepemimpinan global setelah menyelesaikan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali kemarin dan memegang keketuaan ASEAN tahun depan. Posisi saat ini, kata Presiden Jokowi, merupakan bentuk kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia yang harus dijaga.

Sebagai Presiden G20, Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani perbedaan yang sangat dalam dan lebar. Namun, Presiden Jokowi meyakini jika keberhasilan hanya akan dapat tercapai jika semua negara, tanpa terkecuali, berkomitmen, bekerja keras, menyisihkan perbedaan-perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret dan bermanfaat bagi dunia di tengah berbagai tantangan yang dihadapi.

Kepemimpinan Indonesia pada G20 telah berhasil menghasilkan Deklarasi Pemimpin G20 Bali. “Para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi yaitu condemnation perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah, melanggar integritas wilayah,” ujar Presiden dalam pernyataan pers di media center di Bali International Convention Center,

Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu, 16 November 2022.

Menurut Presiden, G20 Bali juga telah menghasilkan beberapa hasil konkret, antara lain terbentuknya pandemic fund yang sampai hari ini terkumpul 1,5 miliar dolar AS, pembentukan dan operasionalisasi resilient and sustainability trust di bawah Dana Moneter International (IMF) sejumlah 81,6 miliar dolar AS untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis.

“Kemudian juga energy transition mechanism, khususnya untuk Indonesia, memperoleh komitmen dari Just Energy Transition Programme sebesar 20 miliar dolar AS,” imbuhnya.

Di samping itu, dihasilkan juga komitmen bersama yakni setidaknya 30 persen dari daratan dunia dan 30 persen lautan dunia dilindungi di tahun 2030.

Setelah berhasil memimpin G20 selama satu tahun terakhir, Indonesia menerima estafet keketuaan ASEAN dari Kamboja dan akan menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023. Penyerahan keketuaan tersebut berlangsung pada Upacara Penutupan KTT Ke-40 dan Ke-41 serta KTT Terkait lainnya di Hotel Sokha

Phnom Penh, Minggu, 13 November 2022.

“Sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi Ketua ASEAN tahun 2023. Keketuaan Indonesia akan menjadikan ASEAN Matters: Epicentrum of Growth,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi mengatakan ASEAN harus menjadi kawasan yang stabil dan damai, dan menjadi jangkar stabilitas dunia. ASEAN juga harus konsisten menegakkan hukum internasional dan tidak menjadi proksi siapapun.

“ASEAN harus menjadi kawasan yang bermartabat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi,” ucap Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Dalam KTT yang beranggotakan pemimpin ASEAN ditambah pemimpin Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, dan Republik Korea itu, Presiden Jokowi mengajak para pemimpin ASEAN Plus Three bekerja sama untuk menghadapi krisis saat ini.

Presiden Jokowi menjelaskan, APT harus fokus setidaknya terhadap tiga isu yaitu krisis pangan, resesi ekonomi, serta stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan.

Sumber: presidenri.go.id



Foto. BPMI Setpres/Laily Rachev

Komisi III DPR RI dan Pemerintah Sahkan RUU KUHP Jadi UU

Foto. Yatno/ kemenkumham.go.id

Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan RUU KUHP dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP, Selasa (06/12/2022).

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan pengesahan ini merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia yakni pembaruan hukum pidana nasional dan sebagai upaya untuk terlepas dari peninggalan kolonialisme sepenuhnya.

“Kita patut berbangga karena berhasil memiliki KUHP sendiri, bukan buatan negara lain. Jika dihitung dari mulai berlakunya KUHP Belanda di Indonesia tahun 1918, sudah 104 tahun sampai saat ini. Indonesia sendiri telah merumuskan pembaruan hukum pidana sejak 1963,” ujar Yasonna usai rapat paripurna DPR RI.

Menurut Yasonna, produk Belanda ini dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan

kebutuhan hukum pidana di Indonesia. RUU KUHP sudah sangat reformatif, progresif, juga responsif dengan situasi di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu urgensi pengesahan RUU KUHP.

“RUU KUHP sudah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan, seluruh penjuror Indonesia. Pemerintah dan DPR mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas partisipasinya dalam momen bersejarah ini,” tambah Menteri Yasonna.

“Perbedaan mendasar adalah RUU KUHP tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, melainkan pidana khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan sepuluh tahun,” tutur Yasonna.

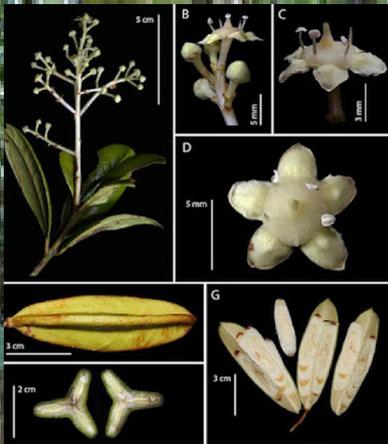
Dalam pidana pokok, RUU KUHP tidak hanya mengatur pidana penjara dan denda saja, tetapi menambahkan pidana penutupan, pidana pengawasan, serta pidana kerja sosial.

Selain itu, RUU KUHP juga mengatur badan hukum atau korporasi sebagai pihak yang dapat bertanggung jawab dan dipidana.

Meskipun demikian, perjalanan penyusunan RUU KUHP tidak selalu mulus. Pemerintah dan DPR sempat dihadapkan dengan pasal-pasal yang dianggap kontroversial. Namun, Yasonna meyakinkan masyarakat bahwa pasal-pasal dimaksud telah melalui kajian berulang secara mendalam.

Yasonna menilai pasal-pasal yang dianggap kontroversial bisa memicu ketidakpuasan golongan-golongan masyarakat tertentu. Yasonna mengimbau pihak-pihak yang tidak setuju atau protes terhadap RUU KUHP dapat menyampaikannya melalui mekanisme yang benar. Masyarakat diperbolehkan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sumber: kemenkumham.go.id



Spesies Pohon Raksasa Baru Ditemukan di *Sumatra*

Spesies pohon raksasa baru berhasil diidentifikasi di Sumatera. Pohon yang kemudian diberi nama *Lophopetalum tanahgambut* ini mampu tumbuh setinggi 40 meter dengan diameter batang setinggi dada (dbh) mencapai 1,05 meter. Sementara sistem akarnya sendiri lebar, dapat mencapai 15 meter mengelilingi pohon dan menjulang setinggi 1,5 meter dari permukaan tanah.

Mengutip Sci News, Selasa (22/11/2022) spesies baru ini masuk dalam genus *Lophopetalum* dalam keluarga Celastraceae. Genus *Lophopetalum* sendiri mencakup hampir 20 spesies asli diakui yang saat ini berada di India, Bangladesh, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Nugini, Filipina, Thailand, Vietnam, Australia, dan Kepulauan Andaman.

“Dalam keluarga Celastraceae, suku *Lophopetaleae* termasuk tiga genera paleotropis dengan biji bersayap yang tak memiliki aril,” kata Agusti Randi, peneliti

dari National University, Singapura. *Lophopetalum* sendiri membentang dari India hingga Australia utara, tetapi keanekaragaman spesies berpusat di Melesia barat dan tujuh dari 19 spesies berada di pulau Sumatera.

Sementara itu, spesies baru dinamakan *Lophopetalum tanahgambut* karena hanya diketahui di hutan rawa gambut di Sumatera. “Hutan rawa gambut dikenal dengan keunikannya yang miskin unsur hara, kaya karbon, dan kondisi basah yang memerlukan adaptasi khusus untuk bertahan hidup,” jelas para peneliti. Sayangnya, habitat itu telah mengalami konversi ekstensif menjadi lahan pertanian dan hanya menyisakan 11 persen hutan rawa yang tak terganggu.

Lebih lanjut, *Lophopetalum tanahgambut* memiliki kulit batang halus, dengan warna abu-abu muda hingga kusam atau putih susu. Sedangkan kulit bagian dalam berwarna oranye merah muda hingga cokelat kemerahan pucat. “Spesies ini

adalah satu-satunya pohon *Lophopetalum* yang dikenal dengan 3-4 dalam susunan pseudovercillate,” catat para peneliti.

Selain itu, peneliti juga menemukan pada cabang yang lebih tua terdapat daun yang berseberangan. Tetapi biasanya juga terdapat bekas luka daun sedikit di bawahnya, yang menunjukkan bahwa daun tak diatur secara berlawanan dari awal, tetapi bergeser saat cabang menjadi dewasa.

Lophopetalum tanahgambut juga diamati berbunga pada bulan Februari-April dan berbuah pada bulan April-Juni. Peneliti merekomendasikan pohon spesies baru ini harus dikategorikan Sangat Terancam Punah. “Secara keseluruhan hutan rawa gambut yang tak terganggu telah menurun dan terancam di seluruh Asia Tenggara dan sebagian besar lahan gambut yang tersisa dikonversi menjadi lahan pertanian atau terdegradasi akibat drainase,” tambah para peneliti. Studi dipublikasikan dalam jurnal *Phytotaxa* edisi 17 November 2022.

Sumber: Kompas.com

Indahnya Pulau Gosong di Kepulauan Seribu

Muncul saat Air Laut Surut

Pulau Gosong yang ada di Kepulauan Seribu merupakan daya tarik baru bagi pencinta wisata pantai. Belakangan, pulau ini ramai menjadi perbincangan wisatawan.

Ada satu keunikan dari pulau ini, yaitu hanya muncul saat air laut surut. Hamparan pasir putih terlihat seperti gundukan, dan menjadi spot Instagramable di Kepulauan Seribu Utara. Perlu diketahui, Kepulauan Seribu, merupakan salah satu wilayah di Jakarta yang memiliki panorama alam pantai dan bawah laut yang sangat indah. Pulau Gosong menjadi salah satu yang mulai diincar wisatawan.

Pulau Gosong memang tidak sepopuler dengan pulau-pulau lainnya di Kepulauan Seribu. Sebab, pulau ini tidak berpenghuni dan masih jarang terjamah. Kebanyakan wisatawan yang datang ke tempat ini hanya bermain di pantai dan tidak menginap. Kendati demikian, pulau ini memiliki keindahan alam yang luar biasa. Daya tarik lain Pulau Gosong adalah udara yang masih sangat asri. Tempat ini cocok untuk para wisatawan yang senang dengan liburan private. Sebaiknya kunjungi tempat ini saat hari biasa karena dijamin berasa punya pulau sendiri.

Anda bisa mengunjungi pulau ini hanya pada waktu tertentu. Sebab, Pulau Gosong hanya akan muncul saat air laut surut. Pulau Gosong terbentuk dari endapan pecahan kerang, koral, dan berbagai binatang laut. Bentuknya ini makin lama membesar, sehingga menjadi pulau kecil. Fenomena ini bisa terjadi karena Kepulauan Seribu terletak di Laut Jawa dan Teluk Jakarta yang terdiri atas gugusan pulau-pulau dan terumbu karang. Bagi penggemar snorkeling wajib menjajal menyelam di bawah lautnya. Ada banyak terumbu karang hingga biota laut berwarna-warni.

Ada banyak aktivitas menarik yang bisa dilakukan di pulau ini, mulai dari snorkeling, berfoto, atau sekadar mengabadikan momen. Namun perlu diingat, saat berkunjung ke Pulau Gosong sebaiknya tidak perlu lama-lama. Anda bisa pilih waktu pagi atau sore hari. Sebab, bila terlalu lama Anda akan mendapatkan kulit yang sama dengan nama pulau ini.

Sumber: regional.kompas.com



- 1** Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo memberikan pembekalan kepada peserta PPRA 64 dan alumni PPRA 63 tahun 2022 Lemhannas RI bertempat di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu (12/10).
- 2** Gubernur Lemhannas RI Andi Widjanto menghadiri acara makan malam bersama Ketua Parlemen Singapura Mr. Tan Chuan-Jin dan Duta Besar Singapura untuk Indonesia Y.M. Mr. Kwok Fook Seng bertempat di Hotel Fairmont Jakarta pada Rabu (05/10).
- 3** Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjanto menghadiri Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2022 bertempat di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta pada Sabtu, 1 Oktober 2022





4 Gubernur Lemhannas RI Andi Widjanto menerima kunjungan dari Direktur Pengkajian dan Pengembangan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) Brigjen TNI Achmad Fauzi, S.I.P, M.M. bertempat di Ruang Nusantara 1, Gedung Trigatra pada Selasa (1/11)



5 Gubernur Lemhannas RI Andi Widjanto memberikan pembekalan dalam acara Jambore Nasional Generasi Ke-3 TIBTA 65 bertempat di Auditorium Gajah Mada, Gedung Pancagatra pada Sabtu (05/11)

6 Sejumlah Calon Peserta PPRA 65 Lemhannas RI mengikuti Pelaksanaan Tes Potensi Akademik (TPA) dan Psikotes bertempat di Ruang NKRI dan Ruang Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Pancagatra, Lemhannas RI pada Senin, 21 November 2022.



7 Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Andi Widjajanto menerima audiensi Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr. Mohammad Adib Khumaidi, Sp.OT. pada Kamis (08/12)

8 Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto menghadiri rapat koordinasi dengan Kantor Staf Presiden pada Rabu, (14/12)

9 Lemhannas RI Raih Kualifikasi Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022



KATEGORI LN - LPNK

11	Arsip Nasional Republik Indonesia	94,40
12	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	94,03
13	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	93,62
14	Radio Republik Indonesia	92,36
15	Mahkamah Konstitusi	92,26
16	Lembaga Ketahanan Nasional	91,80
17	Badan Kepegawaian	90,93

Ayo Sampaikan
**Aspirasi & Pengaduan
Pelayanan Publik**

Anda melalui:

www.lapor.go.id





**LEMHANNAS RI
RAIH KUALIFIKASI BADAN PUBLIK**



INFORMATIF



**ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022**

